

	BAB I PENDAHULUAN
--	-------------------------------------

A. Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu penyelenggaraan *Good Governance* adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan Anggaran. Hal terpenting yang diperlukan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja yang disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama

tahun 2018 dalam rangka pencapaian misi dan visi dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu kegiatan kinerja setiap unit kerja di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholder demi perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi .

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

C. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil dari kinerja tersebut dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi dalam mencermati berbagai permasalahan serta sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan pada tahun berikutnya agar dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

D. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi yang sebelumnya dikenal dengan nama Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi selaku lembaga yang mengkoordinasikan pengendalian dampak lingkungan di provinsi berdiri sejak tahun 1998 yaitu setelah dikeluarkannya KEPPRES Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tersebut di atas.

Berpedoman kepada KEPPRES dan KEPMENDAGRI tersebut, maka dengan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 1998 Tanggal 19 Oktober 1998 disahkan Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Daerah Tingkat I Jambi, oleh Menteri Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 6 Tahun 1998.

BLHD yang dulunya berdasarkan Perda Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2000 dan dijabarkan uraian tugasnya dalam Keputusan Gubernur Jambi Nomor 230 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan-satuan Organisasi Pada Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi, menjadi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala.

Tugas Kepala Badan yaitu melakukan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam fungsi DLH serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTB dan Kelompok jabatan Fungsional.

2. Sekretariat dengan tiga Sub Bagian.

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas Sekretariat yaitu membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan rencana program pengelolaan urusan tata usaha, tata laksana keuangan, kepegawaian, data dan informasi dan pengelolaan barang milik daerah pada lingkup dinas lingkungan hidup. Sedangkan fungsinya antara lain :

- a. Pengkoordinasian kegiatan dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi;
- b. Pengkoordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi
- c. Pembinaan, pengelolaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi tatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggan, arsip dan dokumentasi dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah;
- e. Pengelolaan pemberitaan, publikasi, hubungan masyarakat serta penyajian dan pelayanan informasi publik; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Tata Lingkungan.

- a. Kepala Seksi Inventarisasi lingkungan hidup;
- b. Kepala Seksi perubahan iklim dan perencanaan ekonomi lingkungan
- c. Kepala Seksi kajian dampak lingkungan

Tugas Bidang Tata Lingkungan yaitu menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan dibidang inventarisasi lingkungan hidup, KLHS dan perencanaan ekonomi lingkungan dan kajian dampak lingkungan. Sedangkan fungsinya antara lain :

- a. Penyusunan bahan program/kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan teknis, inventarisasi lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati, KLHS dan perencanaan ekonomi lingkungan dan kajian dampak lingkungan;
 - b. Pelaksanaan perencanaan perlindungan dibidang tata lingkungan meliputi penyusunan RPPLHD, evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam, evaluasi pengembangan perangkat kebijakan, evaluasi penerapan perencanaan lingkungan, rumusan kebijakan KLHS, DDDT, ekonomi lingkungan, audit lingkungan dan penetapan masyarakat hukum adat serta kearifan lokal dan kajian dampak lingkungan;
 - c. Pengevaluasi pelaksanaan perencanaan perlindungan dibidang tata lingkungan meliputi penyusunan RPPLHD, evaluasi pemanfaatandan pencadangan sumber daya alam, evaluasi pengembangan perangkat kebijakan, evaluasi penerapan perencanaan lingkungan, rumusan kebijakan KLHS, DDDT, ekonomi lingkungan, pengembangan dan pengkajian dampak lingkungan, audit lingkungan dan penetapan masyarakat hukum adat serta kearifan lokal;
 - d. Pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pegnelolaan di bidang konservasi lingkungan meliputi, pengembangan periangkat mitigasi perubahan iklim, pelaksanaan inventarisasi emisi gas rumah kaca atau aksi daerah gas rumah kaca (RAD GRK), penetapan status dan tingkat emisi gas rumah kaca, pegendalian bahan perusak ozon;
 - e. Pelaksanaan pemberdayaa masyarakat dibidang tata lingkungan;dan
 - f. Pelaksanaan fugnsi lain lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan dengan dua sub bidang.
 - a. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran
 - b. Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan; dan
 - c. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, B-3 dan limbah B-3

Tugas Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan yaitu melaksanakan sebagian tugas membantu Dinas dalam rangka merumuskan bahan kebijakan teknis dibidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, B-3 dan limbah B-3, sedangkan fungsinya antara lain :

- a. Penyusunan bahan program/kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan teknis bidang pengendalian pencemaran dankerusakan ligkugnan serta pengelolaan sampah B-3 dan limbah B-3;

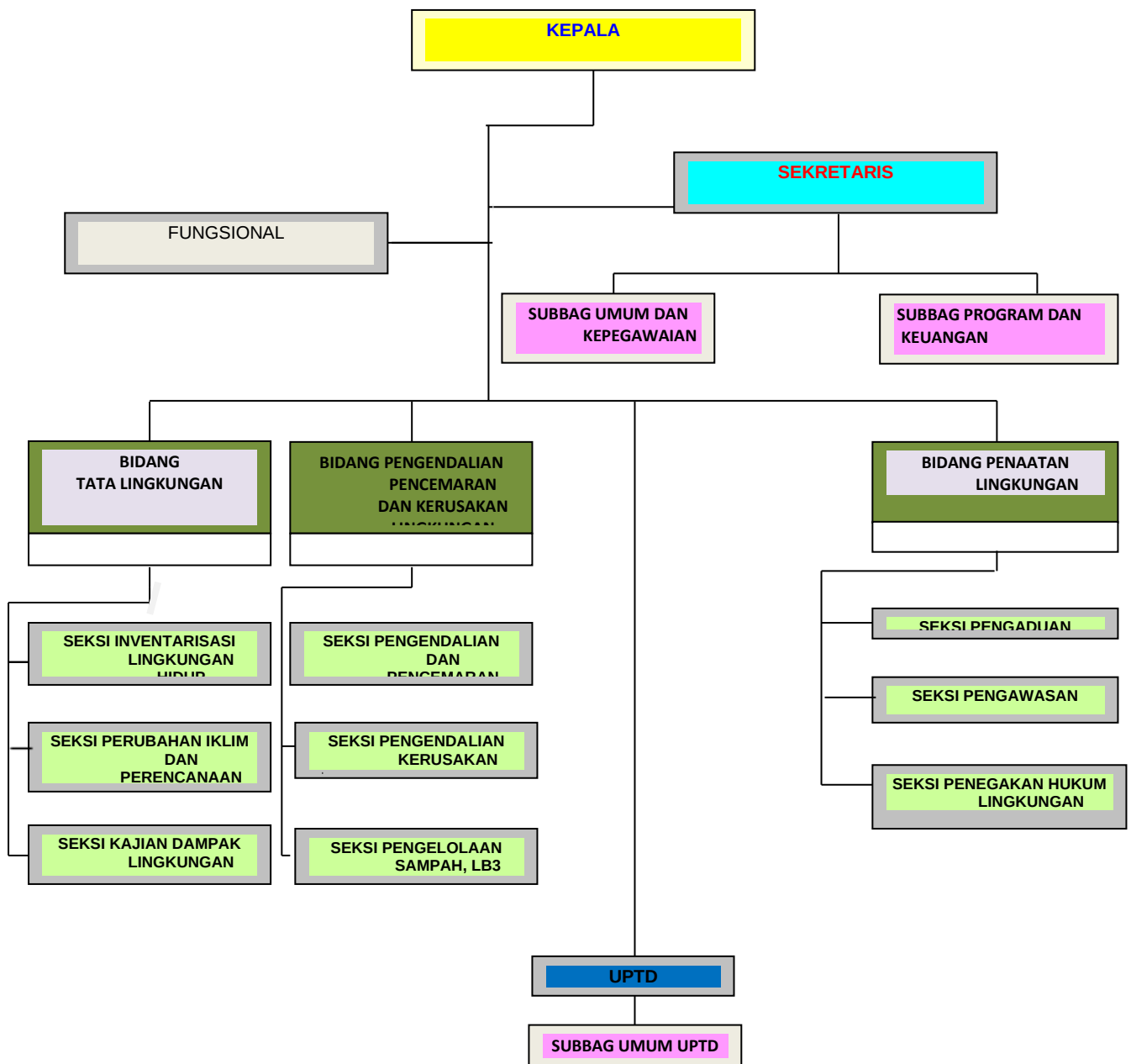
- b. Pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, B-3 dan limbah B-3;
 - c. Pengevaluasian pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, B-3 dan limbah B-3;
 - d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - e. Pelaksanaan fungsi teknis di bidang pengendalian kerusakan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan serta pengelolaan persampahan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Bidang Penataan Lingkungan dengan dua sub bidang.
- a. Kepala Seksi Pengaduan
 - b. Kepala Seksi Pengawasan
 - c. Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

Tugas Bidang Penataan Lingkungan yaitu membantu dinas dalam rangka menyiapkan kebijakan teknis dibidang pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, sedangkan fungsinya antara lain :

- a. Penyusunan bahan program/kegiatan koordinasi fasilitasi, pembinaan teknis bidang pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
 - b. Pelaksanaan pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
 - c. Pengevaluasian pelaksanaan bidang pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum;
 - d. Pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bidang penataan hukum lingkungan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan satu sub Bagian
- a. Kepala Tata Usaha UPTD
 - b. 90 orang pelaksana umum dan fungsional PEDAL
7. 109 orang pelaksana yang terdiri dari kelompok fungsional umum dan fungsional tertentu yang terdiri dari fungsional PEDAL, PPNS dan PPLHD. Kelompok jabatan fungsional tertentu merupakan kelompok jabatan dengan keahlian khusus. Ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan dalam pembentukan kelompok jabatan fungsional sebagai berikut:
- Keputusan Presiden No. 100 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional.

- Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.47/KEP/MENPAAN/8/2002 tentang jabatan Fungsional Pengendali DampakLingkungan dan Angka Kreditnya.
- Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup No. 145 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya.
- Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup No. 146 Tahun 2004 tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan Untuk Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.
- Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup No. 147 Tahun 2004 tentang Kode Etik Profesi Pengendali Dampak Lingkungan.
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 62 Tahun 2004 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.

Gambar 1. Struktur Organisasi DLH Provinsi Jambi



E. Tugas dan Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mempunyai *fungsi* sebagaimana tersurat pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, yaitu;

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di penyelenggaraan bidang lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan bidang lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup;
3. Pengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun (LB3); pengelolaan keanekaragaman hayati pengendalian perubahan iklim, pengendalian kerusakan pada hutan, lahan , ekosistem perairan darat, ekosistem pesisir dan laut serta kerusakan ekosistem gambut;
4. Pemanatauan, pengawasan dan pembinaan pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun (LB3); pengelolaan keanekaragaman hayati pengendalian perubahan iklim, pengendalian kerusakan pada hutan, lahan , ekosistem perairan darat, ekosistem pesisir dan laut serta kerusakan ekosistem gambut;
5. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program kegiatan pada sekretariat, bidang dan kelompok jabatan fungsional serta UPTD;
6. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
7. Penyajian data dan informasi kualitas lingkungan serta penerapan hukum lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
8. Pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia serta pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah di daerah bidang lingkungan hidup;

9. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya;

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi saat ini mempunyai susunan organisasi yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Kepala.

Tugas Kepala Badan yaitu melakukan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam fungsi DLH serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTB dan Kelompok jabatan Fungsional.

2. Sekretariat dengan tiga Sub Bagian.

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas Sekretariat yaitu membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan rencana program pengelolaan urusan tata usaha, tata laksana keuangan, kepegawaian, data dan informasi dan pengelolaan barang milik daerah pada lingkup dinas lingkungan hidup . Sedangkan fungsinya antara lain :

- a. Pengkoordinasian kegiatan dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi;
- b. Pengkoordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi
- c. Pembinaan, pengelolaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi tatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggan, arsip dan dokumentasi dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah;
- e. Pengelolaan pemberitaan, publikasi, hubungan masyarakat serta penyajian dan pelayanan informasi publik; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Tata Lingkungan.

- a. Kepala Seksi Inventarisasi lingkungan hidup;
- b. Kepala Seksi perubahan iklim dan perencanaan ekonomi lingkungan
- c. Kepala Seksi kajian dampak lingkungan

Tugas Bidang Tata Lingkungan yaitu menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan dibidang inventarisasi lingkungan hidup, KLHS dan perencanaan ekonomi lingkungan dan kajian dampak lingkungan. Sedangkan fungsinya antara lain :

- a. Penyusunan bahan program/kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan teknis, inventarisasi lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati, KLHS dan perencanaan ekonomi lingkungan dan kajian dampak lingkungan;
- b. Pelaksanaan perencanaan perlindungan dibidang tata lingkungan meliputi penyusunan RPPLHD, evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam, evaluasi pengembangan perangkat kebijakan, evaluasi penerapan perencanaan lingkungan, rumusan kebijakan KLHS, DDDT, ekonomi lingkungan, audit lingkungan dan penetapan masyarakat hukum adat serta kearifan lokal dan kajian dampak lingkungan;
- c. Pengevaluasi pelaksanaan perencanaan perlindungan dibidang tata lingkungan meliputi penyusunan RPPLHD, evaluasi pemanfaatandan pencadangan sumber daya alam, evaluasi pengembangan perangkat kebijakan, evaluasi penerapan perencanaan lingkungan, rumusan kebijakan KLHS, DDDT, ekonomi lingkungan, pengembangan dan pengkajian dampak lingkungan, audit lingkungan dan penetapan masyarakat hukum adat serta kearifan lokal;
- d. Pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pegnelolaan di bidang konservasi lingkungan meliputi, pengembangan periangkat mitigasi perubahan iklim, pelaksanaan inventarisasi emisi gas rumah kaca atau aksi daerah gas rumah kaca (RAD GRK), penetapan status dan tingkat emisi gas rumah kaca, pegnendalian bahan perusak ozon;
- e. Pelaksanaan pemberdayaa masyarakat dibidang tata lingkungan;dan
- f. Pelaksanaan fugnsi lain lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan dengan dua sub bidang.

- a. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran
- b. Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan; dan
- c. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, B-3 dan limbah B-3

Tugas Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan yaitu melaksanakan sebagian tugas membantu Dinas dalam rangka merumuskan bahan kebijakan teknis dibidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, B-3 dan limbah B-3, sedangkan fungsinya antara lain :

- a. Penyusunan bahan program/kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah B-3 dan limbah B-3;
- b. Pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, B-3 dan limbah B-3;
- c. Pengevaluasian pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, B-3 dan limbah B-3;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. Pelaksanaan fungsi teknis di bidang pengendalian kerusakan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan serta pengelolaan persampahan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Penataan Lingkungan dengan dua sub bidang.

- a. Kepala Seksi Pengaduan
- b. Kepala Seksi Pengawasan
- c. Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

Tugas Bidang Penataan Lingkungan yaitu membantu dinas dalam rangka menyiapkan kebijakan teknis dibidang pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, sedangkan fungsinya antara lain :

- a. Penyusunan bahan program/kegiatan koordinasi fasilitasi, pembinaan teknis bidang pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
- b. Pelaksanaan pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
- c. Pengevaluasian pelaksanaan bidang pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum;
- d. Pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bidang penataan hukum lingkungan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan satu sub Bagian

- a. Kepala Tata Usaha UPTD

7. 90 orang pelaksana umum dan fungsional PEDAL

Berdasarkan susunan organisasi tersebut diatas dapat dijabarkan bahwa Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

F. Peran Strategis Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi mempunyai peran yang strategis yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup daerah sebagaimana tercermin dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Untuk melaksanakan peran strategis tersebut, sampai saat ini masih ditemui beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLH) Provinsi Jambi antara lain :

1. Masih kurangnya kapabilitas institusi dan aparatur.
2. Masih rendahnya koordinasi dan paradigma instansi yang terkait dalam upaya meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Masih kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dan dunia usaha akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.
4. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam menginformasikan kegiatan bidang lingkungan hidup.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka diperlukan beberapa solusi guna meminimalisir permasalahan yang ada, antara lain :

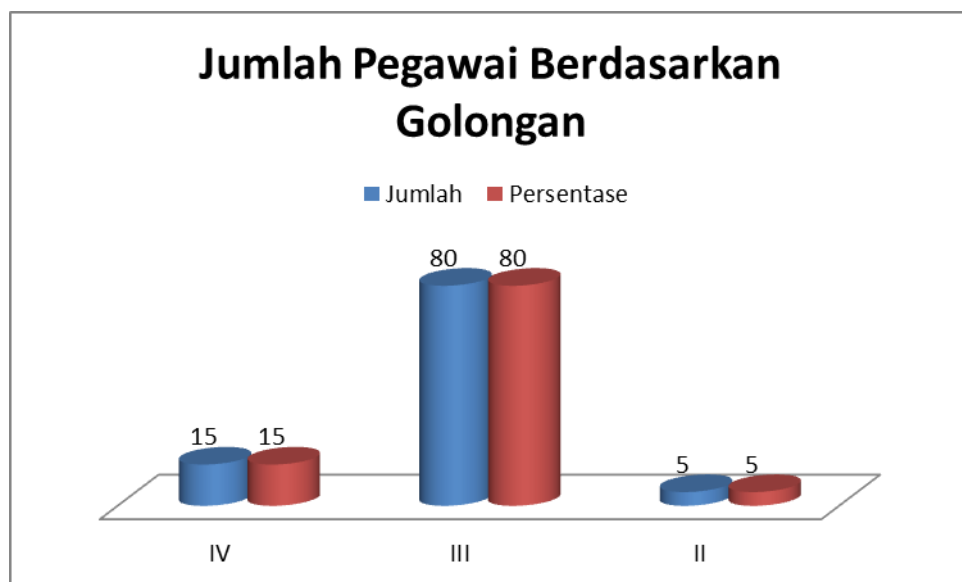
1. Perlunya pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapabilitas institusi dan aparatur terutama untuk tenaga fungsional PEDAL dan PPLH serta tenaga teknis laboratorium.
2. Sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan dunia usaha, dan stake holder terkait akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup

3. Melakukan Koordinasi dengan lembaga lingkungan hidup se provinsi jambi dan pihak terkait lainnya dalam rangka meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.
4. Mempersiapkan sarana untuk mensosialisasikan kegiatan bidang lingkungan baik secara online (website) kepada masyarakat umum.

G. Sumber Daya Pegawai Badan Lingkungan Hidup Daerah (DLH) Provinsi Jambi

Untuk mengemban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, saat ini Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi memiliki Pegawai sampai dengan Desember 2018 sebanyak 88 orang dengan rincian sebagai berikut :

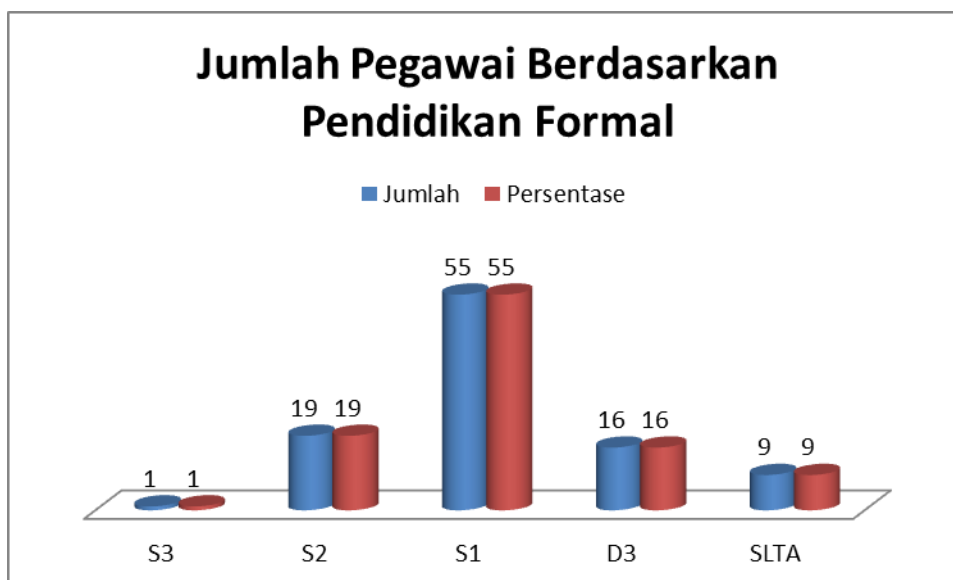
1. Berdasarkan Golongan



Gambar 2. Grafik Pegawai Berdasarkan Golongan s/d Desember 2018

Dari grafik sumber daya pegawai berdasarkan golongan di atas, terlihat bahwa sebagian besar (80 %) pegawai DLHD Provinsi Jambi s/d Desember 2018 adalah golongan III. Sedangkan pegawai yang bergolongan IV memiliki presentase 15 %. Sedangkan pegawai dengan golongan II memiliki presentase 5 %.

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

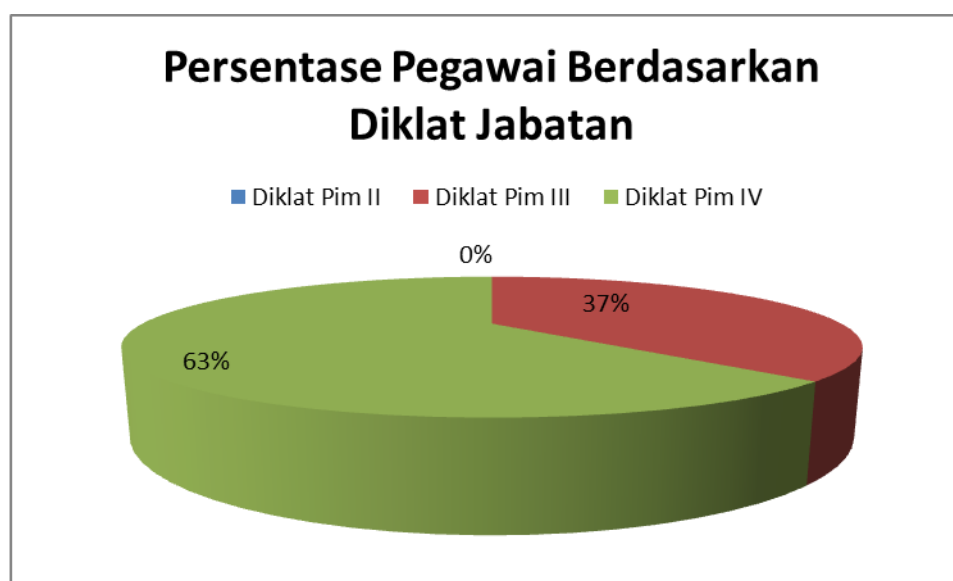


Gambar 3. Grafik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal s/d Desember 2018

Berdasarkan gambar 3, terlihat bahwa 55 % pegawai DLH Provinsi Jambi memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S-1) dan 19% memiliki latar belakang pendidikan S2, 16% memiliki latar belakang pendidikan D3, dan 1 % (S-3), 9% dengan latar belakang SLTA.

3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Non Formal

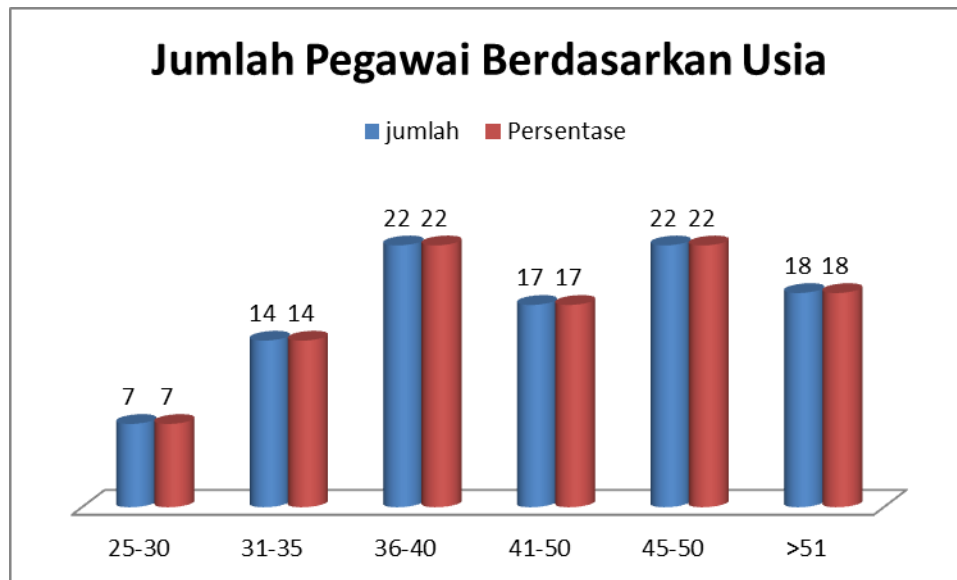
Disamping pendidikan formal, pegawai BLHD Provinsi Jambi juga telah mengikuti pendidikan non formal (struktural), Data selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 4. Grafik Pegawai Berdasarkan Diklat Jabatan Struktural s/d Desember 2018

Memperhatikan gambar tersebut diatas menunjukan bahwa pegawai DLH Provinsi Jambi yang telah mengikuti Diklat PIM IV sebanyak 63 %, Diklat PIM III sebanyak 37 % .

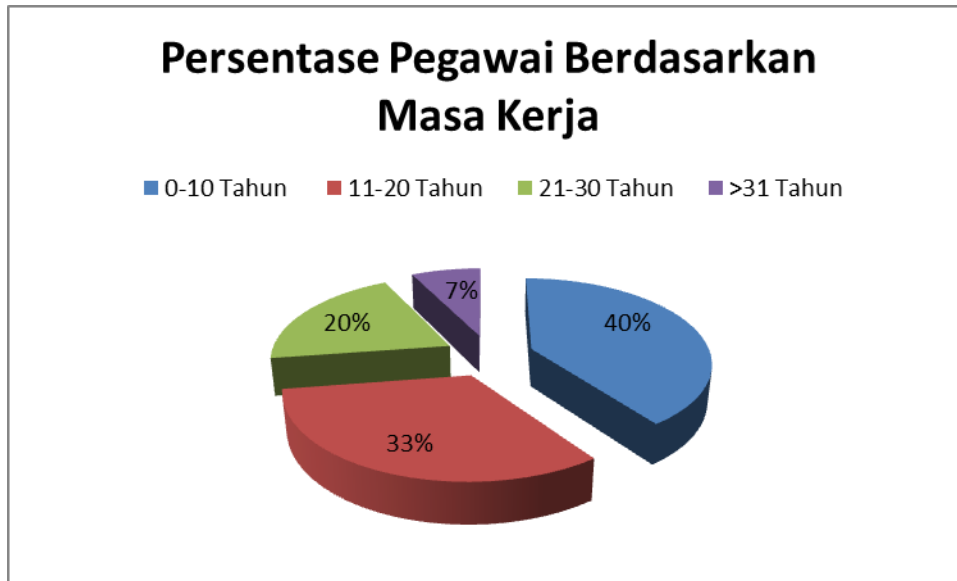
4. Berdasarkan Usia



Gambar 5. Grafik Pegawai Berdasarkan Usia s/d Desember 2018

Mencermati data yang tertera pada gambar 5. terdapat 27,37 % pegawai dengan usia > 51 tahun, 20% pegawai dengan usia 31-35 tahun, 16,84% pegawai dengan usia 41 – 4 tahun dan 45-45 tahun, 11,58 % pegawai dengan usia 25-30 tahun , 7,37 % pegawai dengan usia 36-40 tahun.

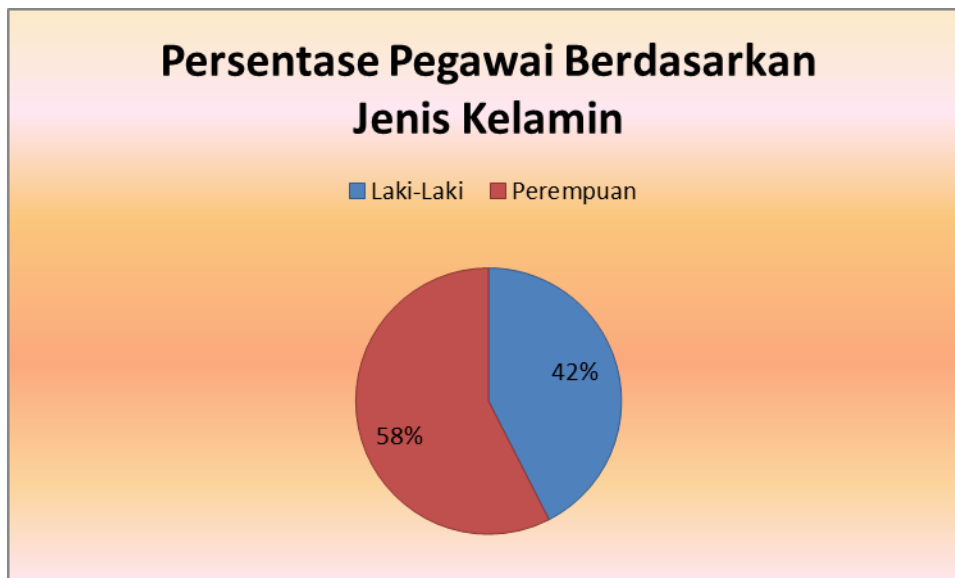
5. Berdasarkan Masa Kerja



Gambar 6. Grafik Pegawai Berdasarkan Masa Kerja s/d Desember 2018

Dari grafik di atas, terlihat bahwa 40 % pegawai DLH Provinsi Jambi memiliki masa kerja antara 0-10 tahun dan 33 % memiliki masa kerja 11-20 tahun, 7% pegawai memiliki masa kerja >31 tahun. Ini berarti banyak pegawai dengan pengalaman yang cukup (11-30 tahun) lebih banyak dibanding pegawai yang pengalamannya masih minim (0-10 tahun). Untuk meminimalkan gap pengalaman antar dua golongan tersebut, diupayakan pembinaan pegawai yang maksimal untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai baru, diantaranya melalui penyertaan diklat, magang serta bentuk pengembangan pegawai lainnya yang sesuai dan mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari DLH Provinsi Jambi.

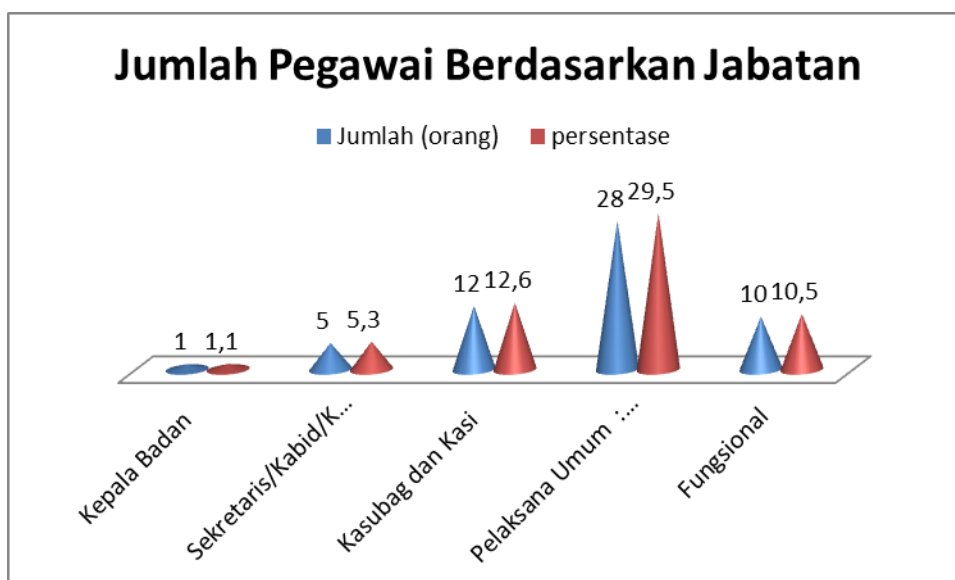
6. Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 7. Grafik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin s/d Desember 2018

Mencermati data yang tertera pada gambar 7. terlihat bahwa 58 % pegawai DLH Provinsi Jambi adalah Perempuan dan 42 % terdapat pegawai Laki-Laki. Namun demikian, pegawai pria dan wanita di DLH Provinsi Jambi memperoleh perlakuan yang setara serta memiliki kesempatan yang sama dalam berkarir. Hal ini dibuktikan dengan adanya 3 pegawai wanita dan 1 pegawai pria yang menduduki jabatan eselon 3 dan 6 pegawai wanita dan 6 pria pegawai yang menduduki jabatan eselon 4.

7. Berdasarkan Tingkat Jabatan



Gambar 8. Grafik Pegawai Berdasarkan Tingkat Jabatan

Keterangan :

Eselon II	: Kepala Badan (1,1%)
Eselon III	: Sekretaris/Kabid/Kepala UPTD (5,3%)
Eselon IV	: Kasubag dan Kasi (12,6%)
Pelaksana Umum	: Sarjana dan non sarjana (29,5)
Fungsional	: Sarjana dan non Sarjana (10,5%)

H. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja ini, penyajikan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi selama Tahun 2018. Pencapaian kinerja diukur dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

Executive summary (Ikhtisar Eksekutif)

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik serta sejauhmana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan,

Dalam bab ini penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Matrik Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 (Pernyataa dan Perjanjian Kinerja)
2. Data lain yang terkait seperti penghargaan yang diterima selama tahun 2018

	BAB II PERENCANAAN KINERJA
--	--

Penetapan/Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Penetapan/Perjanjian Kinerja antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan Monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Agar kinerja dapat tercapai secara maksimal maka untuk mencapai tujuan strategis, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi telah menyusun Penetapan/Perjanjian Kinerja sebagai acuan dalam mengimplementasikan kegiatan

pada tahun 2018. Sepanjang tahun tersebut Penetapan/Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah dibuat sebanyak 1 kali yaitu pada Penetapan Program/Kegiatan yang didukung melalui Anggaran APBD Murni Tahun 2018.

Rincian Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang meliputi program, sasaran, indikator kinerja, dan target selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4 Penetapan/Perjanjian Kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.
Penetapan/Perjanjian Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
PROGRAM WAJIB SKPD				
1.	Peningkatan penyebaran informasi lingkungan hidup melalui berbagai media.	1.	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	
2.	Menjadikan informasi sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan lingkungan hidup		a. Jumlah pelaksanaan peringatan hari Lingkungan Hidup Sedunia Provinsi Jambi	1 kali
			b. Jumlah penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH) Provinsi Jambi	1 dokumen
			c. Jumlah pelaksanaan pengelolaan Website dan media sosial Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	1 paket
			d. Jumlah pemilihan Duta Lingkungan Hidup	1 paket
			e. Jumlah pembinaan dan Penilaian Kalpataru	11 Kab/Kota
3.	Melaksanakan koordinasi antara fungsi-fungsi kelembagaan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	2.	Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Program Lingkungan Hidup	

			a. Jumlah pengambilan Data terkait Forum Informasi Perangkat Daerah dan LPPD	4 kali/tahun
			b. Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi	2 kali/tahun
			c. Persentase penyusunan Rencana Kerja	100%
7.	Meningkatkan kelengkapan alat dan sistem laboratorium	3.	Pendayagunaan Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah	
8.	Melakukan pembinaan dan pengawasan laboratorium lingkungan		a. Jumlah kegiatan pengujian sampel lingkungan	340 sampel/bulan
9.	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Lingkungan Hidup		b. Jumlah target Pendapatan Asli Daerah	Rp3.400.000.000
10.	Menyusun naskah kebijakan perencanaan penataan lingkungan hidup	4.	Koordinasi Penyusunan AMDAL	
			a. Frekuensi pemantauan Kondisi Rencana Usaha/Kegiatan	Tentative
			b. Jumlah pembinaan dan Pemantauan Izin Lingkungan/RKL-RPL Perusahaan se Provinsi Jambi	10 Perusahaan
			c. Jumlah binwas Kinerja KPA dan Instansi LH serta Verifikasi Lisensi KPA	11 Kab/Kota
			d. Jumlah pembinaan Masyarakat Hutan Adat	10 MHA
11.	Menyusun naskah kebijakan perencanaan perlindungan lingkungan hidup	5.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	
			a. Jumlah inventarisasi data dan pembinaan pengelolaan sampah	11 kab/kota
			b. Jumlah penilaian adipura	4 kab/kota
		6.	Pengendalian Dampak perubahan iklim	

			a. Jumlah pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (PEP RAD GRK) Sektor Limbah dan Sistem Informasi Gas Rumah Kaca Nasional Sederhana, Mudah, Akurat, Ringkas dan Transparan (SIGN SMART)	11 kab/kota
			b. Jumlah Pembinaan Kegiatan Proklim	17 Desa
			c. Jumlah Identifikasi KEHATI Provinsi Jambi	11 Kab/Kota
		7.	Pengembangan Study Kebijakan lingkungan	
			a. Jumlah validasi dan Rapat Koordinasi KLHS	Tentative
			b. Jumlah penyusunan Rencana Naskah Akademik Kebijakan NSDA Provinsi Jambi	1 dokumen
			c. Jumlah Inventarisasi SDA Provinsi Jambi	1 dokumen
			d. Jumlah Inventarisasi Peta SDA berbasis GIS	1 dokumen
			e. Jumlah Penyusunan Naskah Akademik RPPLH	1 dokumen
			f. Jumlah Ketersediaan dan Interpretasi ZAE	1 dokumen
12.	Meningkatkan frekuensi pemantauan kualitas air sungai	8.	Pemantauan Kualitas Lingkungan	
13.	Meningkatkan pembinaan kegiatan usaha, masyarakat di sekitar sungai		a. Jumlah Pemantauan Kualitas Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Jambi	2 kali di 7 Kab/kota
14.	Menyediakan sarana dan prasarana pemantauan		b. Jumlah Pemantauan Kualitas Udara Ambeien di Wilayah Provinsi Jambi	2 kali di 11 Kab/kota
15.	Meningkatkan frekuensi pemantauan kualitas udara		c. Jumlah pelaksanaan Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi Pemantauan Kualitas Lingkungan	4 kali
16.	Meningkatkan pembinaan kegiatan dan/atau usaha dan masyarakat		d. Jumlah pemantauan Kualitas Air Laut	1 kali di 2 Kab/kota

17.	Menyediakan sarana dan prasarana pemantauan udara		e. Jumlah pemantauan Kualitas Air Danau	2 kali di 2 Kab/kota
18.	Meningkatkan pembinaan ke dunia usaha/kegiatan limbah B3	9.	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	
19.	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas pengelola LB3		a. Jumlah pembinaan Pengelolaan B3 dan LB3 oleh Kegiatan Dunia Usaha/Kegiatan	45 dunia usaha/kegiatan
20.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah			
21.	Penguatan kapasitas kelembagaan pos pengaduan lingkungan hidup	10.	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	
			a. Jumlah pengawasan Terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Air, Udara, Tanah dan LB3)	75 perusahaan
22.	Percepatan proses penanganan pengaduan			
23.	Persamaan persepsi dan peningkatan koordinasi dengan KLHK, DLH Kabupaten/Kota, dan Stakeholder. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan pengaduan, pengawasan, dan penegakan hukum. meningkatkan jumlah perusahaan yang "taat" dalam pengelolaan lingkungan. Persamaan persepsi dan peningkatan koordinasi dengan KLHK, DLH Kabupaten/Kota, dan Stakeholder. menurunkan beban pencemaran lingkungan peningkatan ruang lingkup jasa pelayanan penyediaan data lingkungan	11.	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
			a. Jumlah pelaksanaan penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%
			b. Jumlah pembinaan dan Pembentukan Pos Pengaduan Kabupaten/Kota	11 kab/kota

24.	Peningkatan Pembinaan/ bimbingan dalam pengelolaan LH	12.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	
25.	Pelaksanaan pemilihan duta lingkungan hidup, perlombaan dalam HLH, Pemberian Penghargaan, Pemberian Insentif dan Disinsentif		a. Jumlah pelaksanaan Inventarisasi data dan Pembinaan Pengelolaan Sampah	11 kab/kota
			b. Jumlah Penilaian Adipura	4 kab/kota
26.	Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.			
27.	Pelaksanaan pemilihan duta lingkungan hidup, perlombaan dalam HLH, Pemberian Penghargaan, Pemberian Insentif dan Disinsentif	13.	Koordinasi Program Adiwiyata	
28.	Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.		a. Jumlah Peningkatan Kapasitas Tim Pembina dan Penilai Adiwiyata Provinsi Jambi	11 Kab/Kota
			b. Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Tim Adiwiyata Kabupaten/Kota	11 Kab/Kota
			c. Jumlah Pelaksanaan Penilaian Adiwiyata Kabupaten/Kota	11 Kab/Kota
			d. Jumlah Pendampingan Tim Penilai Adiwiyata Nasional dan Adiwiyata Mandiri	11 Kab/Kota

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja diperlukan dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pelaksanaan kegiatan/ program/kebijakan mencapai yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran dengan rencana kinerja (performance) yang dicapai organisasi.

Untuk melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja sasaran, digunakan kerangka pengukuran kinerja dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana tabel 5 dibawah ini :

Tabel 5. Kerangka Pengukuran Kinerja

Persentase Pencapaian Sasaran	Kriteria
$\geq 100 \%$	Sangat Baik
90-100 %	Baik
70 % - 89,99 %	Cukup Baik
50 % - 69,99 %	Kurang Baik
$\leq 49,99 \%$	Tidak Baik

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/ 2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2016- 2021.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-

masing indikator kinerja. Hasil perbandingan tersebut akan diperoleh persentase pencapaian target. Rincian tingkat capaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran adalah bagai berikut :

Tabel 6.
Pengukuran Capaian Kinerja DLH Provinsi Jambi Tahun 2018

Sasaran Strategis 1				
• Peningkatan penyebaran informasi lingkungan hidup melalui berbagai media. • Menjadikan informasi sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan lingkungan hidup				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
a. Jumlah pelaksanaan peringatan hari Lingkungan Hidup Sedunia Provinsi Jambi	1 kali	1 kali	100	Baik
b. Jumlah penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH) Provinsi Jambi	1 dokumen	1 dokumen	100	Baik
c. Jumlah pelaksanaan pengelolaan Website dan media sosial Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	1 paket	1 paket	100	Baik
d. Jumlah pemilihan Duta Lingkungan Hidup	1 paket	-	0	Tidak Baik
e. Jumlah pembinaan dan Penilaian Kalpataru	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	100	Baik
Sasaran Strategis 2				
Melaksanakan koordinasi antara fungsi-fungsi kelembagaan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
a. Jumlah pengambilan Data terkait Forum Informasi Perangkat Daerah dan LPPD	4 kali/tahun	6 kali/tahun	120	Sangat Baik
b. Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi	2 kali/tahun	2 kali/tahun	100	Baik
c. Persentase penyusunan Rencana Kerja	100%	100%	100	Baik
Sasaran Strategis 3				
• Meningkatkan kelengkapan alat dan sistem laboratorium				

• Melakukan pembinaan dan pengawasan laboratorium lingkungan • Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Lingkungan Hidup				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
a. Jumlah kegiatan pengujian sampel lingkungan	340 sampel/bulan	404 sampel/bulan	121,82	Sangat Baik
b. Jumlah target Pendapatan Asli Daerah	Rp3.400.000.000	Rp.4.141.975.012	118,82	Sangat Baik
Sasaran Strategis 4				
Menyusun naskah kebijakan perencanaan penataan lingkungan hidup				
a. Frekuensi pemantauan Kondisi Rencana Usaha/Kegiatan	Tentative	4 perusahaan	100	Baik
b. Jumlah pembinaan dan Pemantauan Izin Lingkungan/RKL-RPL Perusahaan se Provinsi Jambi	10 Perusahaan	0	0	Tidak Baik
c. Jumlah binwas Kinerja KPA dan Instansi LH serta Verifikasi Lisensi KPA	11 Kab/Kota	2	18	Tidak Baik
d. Jumlah pembinaan Masyarakat Hutan Adat	10 MHA	10 MHA	100	Baik
Sasaran Strategis 5				
Menyusun naskah kebijakan perencanaan perlindungan lingkungan hidup				
a. Jumlah inventarisasi data dan pembinaan pengelolaan sampah	11 kab/kota	11 kab/kota	100	Baik
b. Jumlah penilaian adipura	4 kab/kota	4 kab/kota	100	Baik
a. Jumlah pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (PEP RAD GRK) Sektor Limbah dan Sistem Informasi Gas Rumah Kaca Nasional Sederhana, Mudah, Akurat, Ringkas dan Transparan (SIGN SMART)	11 kab/kota	11 kab/kota	100	Baik
b. Jumlah Pembinaan Kegiatan Proklamasi	17 Desa	2 Desa	11,76	Tidak Baik
c. Jumlah Identifikasi KEHATI Provinsi Jambi	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	100	Baik

a. Jumlah validasi dan Rapat Koordinasi KLHS	Tentative	2 kab. (Kerinci dan Merangin)	100	Baik
b. Jumlah penyusunan Rencana Naskah Akademik Kebijakan NSDA Provinsi Jambi	1 dokumen	1 dokumen	100	Baik
c. Jumlah Inventarisasi SDA Provinsi Jambi	1 dokumen	1 dokumen	100	Baik
d. Jumlah Inventarisasi Peta SDA berbasis GIS	1 dokumen	1 dokumen	100	Baik
e. Jumlah Penyusunan Naskah Akademik RPPLH	1 dokumen	1 dokumen	100	Baik
f. Jumlah Ketersediaan dan Interpretasi ZAE	1 dokumen	1 dokumen	100	Baik
Sasaran Strategis 6				
• Meningkatkan frekuensi pemantauan kualitas air sungai • Meningkatkan frekuensi pemantauan kualitas udara • Meningkatkan pembinaan kegiatan usaha, masyarakat di sekitar sungai				
a. Jumlah Pemantauan Kualitas Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Jambi	2 kali di 7 Kab/kota	2 kali di 7 Kab/kota	100	Baik
b. Jumlah Pemantauan Kualitas Udara Ambien di Wilayah Provinsi Jambi	2 kali di 11 Kab/kota	2 kali di 11 Kab/kota	100	Baik
c. Jumlah pelaksanaan Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi Pemantauan Kualitas Lingkungan	4 kali	4 kali	100	Baik
d. Jumlah pemantauan Kualitas Air Laut	1 kali di 2 Kab/kota	1 kali di 2 Kab/kota	100	Baik
e. Jumlah pemantauan Kualitas Air Danau	2 kali di 2 Kab/kota	1 kali di 2 Kab/kota	50	Kurang baik
Sasaran Strategis 7				
• Meningkatkan pembinaan ke dunia usaha/kegiatan limbah B3 • Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas pengelola LB3				
a. Jumlah pembinaan Pengelolaan B3 dan LB3 oleh Kegiatan Dunia Usaha/Kegiatan	45 dunia usaha/kegiatan	46 dunia usaha/kegiatan	102	Sangat Baik
Sasaran Strategis 8				
• Penguatan kapasitas kelembagaan pos pengaduan lingkungan hidup • Percepatan proses penanganan pengaduan • Persamaan persepsi dan peningkatan koordinasi dengan KLHK, DLH				

Kabupaten/Kota, dan Stakeholder. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan pengaduan, pengawasan, dan penegakan hukum. meningkatkan jumlah perusahaan yang "taat" dalam pengelolaan lingkungan. Persamaan persepsi dan peningkatan koordinasi dengan KLHK, DLH Kabupaten/Kota, dan Stakeholder. menurunkan beban pencemaran lingkungan				
a. Jumlah pelaksanaan penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%	100%	100	Baik
b. Jumlah pembinaan dan Pembentukan Pos Pengaduan Kabupaten/Kota	11 kab/kota	11 kab/kota	100	Baik
a. Jumlah pengawasan Terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Air, Udara, Tanah dan LB3)	75 perusahaan	63 perusahaan	84	Cukup Baik
Sasaran Strategis 9				
• Peningkatan Pembinaan/ bimbingan dalam pengelolaan LH • Pelaksanaan pemilihan duta lingkungan hidup, perlombaan dalam HLH, Pemberian Penghargaan, Pemberian Insentif dan Disinsentif • Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.				
a. Jumlah Peningkatan Kapasitas Tim Pembina dan Penilai Adiwiyata Provinsi Jambi	11 Kab/Kota	0	0	Tidak Baik
b. Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Tim Adiwiyata Kabupaten/Kota	11 Kab/Kota	0	0	Tidak Baik
c. Jumlah Pelaksanaan Penilaian Adiwiyata Kabupaten/Kota	11 Kab/Kota	0	0	Tidak Baik
d. Jumlah Pendampingan Tim Penilai Adiwiyata Nasional dan Adiwiyata Mandiri	11 Kab/Kota	4	36,3	Tidak Baik

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah menetapkan sebanyak 8 Sasaran Strategis yang akan dicapai. Ke 8 sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan 37 Indikator Kinerja. Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2018 menunjukkan bahwa sebanyak 4 indikator telah dicapai dengan hasil yang **"sangat baik"** sedangkan 24 indikator dicapai dengan hasil yang **"baik"**, 1 indikator

dicapai dengan hasil **“cukup baik”**, dan 1 (satu) indikator dengan hasil **“kurang baik”**, dan 8(delapan) indikator dengan hasil **“tidak baik”**.

Capaian kinerja sasaran tersebut diatas, diukur dengan 5 (empat) indikator kinerja. Secara umum, kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pada sasaran I (satu) ini telah memberikan capaian yang **cukup baik** ini terlihat dari angka realisasi rata-rata 80 persen. Secara spesifik capaian indikator kinerja sasaran strategis 1 dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran Strategis 1				
• Peningkatan penyebaran informasi lingkungan hidup melalui berbagai media. • Menjadikan informasi sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan lingkungan hidup				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
a. Jumlah pelaksanaan peringatan hari Lingkungan Hidup Sedunia Provinsi Jambi	1 kali	1 kali	100	Baik
b. Jumlah penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH) Provinsi Jambi	1 dokumen	1 dokumen	100	Baik
c. Jumlah pelaksanaan pengelolaan Website dan media sosial Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	1 paket	1 paket	100	Baik
d. Jumlah pemilihan Duta Lingkungan Hidup	1 paket	-	0	Tidak Baik
e. Jumlah pembinaan dan Penilaian Kalpataru	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	100	Baik

IK – 1 :

Jumlah pelaksanaan peringatan hari Lingkungan Hidup Sedunia Provinsi Jambi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
a. Jumlah pelaksanaan peringatan hari Lingkungan Hidup Sedunia Provinsi Jambi	1 kali	1 kali	100	Baik

Pada tahun 2018, Peringatan Hari Lingkungan Hidup Se-dunia Tingkat Provinsi Jambi dilaksanakan di depan rumah Dinas Gubernur Jambi dengan serangkaian acara diantaranya adalah jalan santai yang diikuti oleh ± 1000 orang dari seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan seluruh masyarakat Provinsi Jambi, , dan dimulai dengan perlombaan dengan mengedepankan tema “ubah perilaku, kurangi sampah plastik” meliputi :

- lomba stand up comedy dengan peserta 8 orang
- lomba poster dengan peserta 40 org
- lomba fotografi tingkat SLTA dengan peserta 13 orang
- lomba upload video melalui instagram dengan peserta 4 orang

IK – 2 :

Jumlah penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH) Provinsi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
b. Jumlah penyusunan Dokumen Indikator Penyusunan Dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH) Provinsi Jambi	1 dokumen	1 dokumen	100	Baik

Penyusunan Dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH) Provinsi Jambi merupakan amanah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penjabaran kinerja Kepala Daerah atas pengelolaan lingkungan hidup.

IK – 3 :

Jumlah pelaksanaan pengelolaan Website dan media sosial Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
c. Jumlah pelaksanaan pengelolaan Website dan media sosial Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	1 paket	1 paket	100	Baik

Website dan media sosial Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi melalui aplikasi Gubernur Menjawab, dan website khusus Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, selain itu promosi dan informasi mengenai kegiatan bidang lingkungan hidup juga disampaikan melalui media sosial, instagram dan facebook.

IK – 4 :

Jumlah pemilihan Duta Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
d. Jumlah pemilihan Duta	1 paket	-	0	Tidak Baik

Lingkungan Hidup				
------------------	--	--	--	--

Kegiatan pemilihan Duta Lingkungan Hidup tidak dilaksanakan mengingat adanya perubahan anggaran yang mengutamakan kegiatan yang lebih prioritas.

IK – 5 :

Jumlah pembinaan dan Penilaian Kalpataru

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
e. Jumlah pembinaan dan Penilaian Kalpataru	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	100	Baik

Pembinaan Kalpataru dilaksanakan atas usulan dari Kabupaten/Kota, dan dilaksanakan penilaian oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Pembinaan dilaksanakan ke seluruh Kabupaten/Kota yang mengajukan usulan.

Sasaran Strategis 2				
Melaksanakan koordinasi antara fungsi-fungsi kelembagaan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
a. Jumlah pengambilan Data terkait Forum Informasi Perangkat Daerah dan LPPD	4 kali/tahun	6 kali/tahun	120	Sangat Baik
b. Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi	2 kali/tahun	2 kali/tahun	100	Baik
c. Persentase penyusunan Rencana Kerja	100%	100%	100	Baik

IK – 1 :

Jumlah pengambilan Data terkait Forum Informasi Perangkat Daerah dan LPPD

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
a. Jumlah pengambilan Data terkait Forum Informasi Perangkat Daerah dan LPPD	4 kali/tahun	6 kali/tahun	120	Sangat Baik

Pengambilan data terkait Forum Informasi Perangkat Daerah dan LPPD meliputi data :

- data program dan kegiatan data DAK TA. 2018
- data terkait penyusunan buku Jambi Dalam Angka yaitu data jumlah pembahasan Amdal dan penerbitan izin pembuangan limbah cair s/d tahun 2018
- data terkait SDGs
- data terkait Penetapan Indikator Kinerja Utama
- data mengenai IKLH

- data LPPD terkait indikator kinerja kunci bidang lingkungan hidup meliputi data kebersihan data kualitas udara, data penegakan hukum.

IK – 2 :

Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
b. Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi	2 kali/tahun	2 kali/tahun	100	Baik

pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan atas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang teknis maupun kegiatan yang berhubungan dengan kabupaten/kota, hal ini terkait DLH Provinsi Jambi melaksanakan pembinaan teknis sesuai dengan kewenangan sebagai perwakilan pemerintah Pusat meliputi pembinaan kegiatan DAK dan pembinaan terkait perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

IK – 3 :

Persentase penyusunan Rencana Kerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Persentase penyusunan Rencana Kerja	100%	100%	100	Baik

Penyusunan Rencana Kerja dilaksanakan pada tahun berjalan, bersama dengan laporan yang berkenaan dengan perencanaan lainnya.

Sasaran Strategis 3				
• Meningkatkan kelengkapan alat dan sistem laboratorium • Melakukan pembinaan dan pengawasan laboratorium lingkungan • Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Lingkungan Hidup				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
a. Jumlah kegiatan pengujian sampel lingkungan	340 sampel/bulan	404 sampel/bulan	121,82	Sangat Baik
b. Jumlah target Pendapatan Asli Daerah	Rp3.400.000.000	Rp.4.141.975.012	118,82	Sangat Baik

IK – 1 :

Jumlah kegiatan pengujian sampel lingkungan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
a. Jumlah kegiatan	340	404	121,82	Sangat

pengujian sampel lingkungan	sampel/bulan	sampel/bulan		Baik
-----------------------------	--------------	--------------	--	-------------

Pada tahun 2018 jumlah sampel yang masuk dan dianalisa oleh Laboratorium kami yaitu 4.849 sampel dengan rincian sampel air limbah berjumlah 2.753 sampel, sampel air sungai berjumlah 701 sampel, sampel air sumur 447 sampel, sampel biota air 53 sampel, sampel emisi 180 sampel, sampel udara ambien 139 sampel, sampel tanah 36 sampel, dan hasil pencapaian target mengalami peningkatan dengan rata-rata perbulan yaitu 404 sampel atau sebesar 121,82%.

IK – 2 :

Jumlah target Pendapatan Asli Daerah

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
b. Jumlah target Pendapatan Asli Daerah	Rp3.400.000.000	Rp.4.141.975.012	118,82	Sangat Baik

Jumlah PAD sampai ahir Desember 2018 ada Rp. 4.141.975.012,- dengan target Rp. 3,4 Milyar atau meningkat menjadi 118,82%.

Sasaran Strategis 4				
Menyusun naskah kebijakan perencanaan penataan lingkungan hidup				
a. Frekuensi pemantauan Kondisi Rencana Usaha/Kegiatan	Tentative	4 perusahaan	100	Baik
b. Jumlah pembinaan dan Pemantauan Izin Lingkungan/RKL-RPL Perusahaan se Provinsi Jambi	10 Perusahaan	0	0	Tidak Baik
c. Jumlah binwas Kinerja KPA dan Instansi LH serta Verifikasi Lisensi KPA	11 Kab/Kota	2	18	Tidak Baik
d. Jumlah pembinaan Masyarakat Hutan Adat	10 MHA	10 MHA	100	Baik

IK – 1 :

Frekuensi pemantauan Kondisi Rencana Usaha/Kegiatan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
a. Frekuensi pemantauan Kondisi Rencana Usaha/Kegiatan	Tentative	4 perusahaan	100	Baik

Realisasi dari pemantauan Kondisi Rencana Usaha/Kegiatan pada 4 perusahaan dikarenakan perusahaan/instansi selaku pemrakarsa dan sudah mengajukan dokumen amdal sebagai berikut :

No	Pemrakarsa/Perusahaan	Jenis Kegiatan	Lokasi
1	PT. Salsabila Hydro Energy	Pembangunan PLTA 2 x 8 MW	Kab. Kerinci
2	Dinas Perhubungan Provinsi Jambi	Pengerukan Alur Pelayaran Sungai Batanghari	Kab. Muara Jambi dan Tanjab Timur
3	PT. Tebo Inti Batubara	Pertambangan Batubara	Kab. Tebo
4	PT. Sarko Bungo Sedayu	Pertambangan Batubara	Kab. Tebo

IK – 2 :

Jumlah pembinaan dan Pemantauan Izin Lingkungan/RKL-RPL Perusahaan se Provinsi Jambi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
b. Jumlah pembinaan dan Pemantauan Izin Lingkungan/RKL-RPL Perusahaan se Provinsi Jambi	10 Perusahaan	0	0	Tidak Baik

Pengawasan dan pemantauan implementasi RKL-RPL difokuskan kepada perusahaan-perusahaan yang sudah 3 (tiga) tahun memiliki surat keputusan kelayakan lingkungan dan izin lingkungan. Untuk tahun 2018 direncanakan terhadap 10 perusahaan yang akan dilaksanakan pembinaan dan pemantauan. Namun target tidak dapat direalisasikan diakibatkan sampai saat ini belum adanya operasional, sebagian besarnya masih dalam proses pembebasan lahan dan pengurusan izin-izin terkait kegiatan.

Dari hasil evaluasi aktif diketahui bahwa belum operasionalnya perusahaan karena terkait dengan sulitnya proses pembebasan lahan dan harga jual komoditi yang masih rendah. Ditinjau dari ketaatan perusahaan, perusahaan tidak membuat laporan RKL-RPL.

IK – 3 :

Jumlah binwas Kinerja KPA dan Instansi LH serta Verifikasi Lisensi KPA

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
c. Jumlah binwas Kinerja KPA dan Instansi LH serta Verifikasi Lisensi KPA	11 Kab/Kota	2	18	Tidak Baik

Pembinaan dan pengawasan terhadap Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota difokuskan kepada Komisi Penilai Amdal Kabupaten Sarolangun dan Kota Jambi, karena dari 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi hanya 2 (kabupaten) tersebut yang telah memiliki komisi penilai amdal.

IK – 4 :

Jumlah pembinaan Masyarakat Hutan Adat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
d. Jumlah pembinaan Masyarakat Hutan Adat	10 MHA	10 MHA	100	Baik

Pada tahun 2018 hanya memverifikasi data Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Jambi. Hutan Adat sampai dengan tahun 2018 belum ada penambahan hanya 11 Hutan Adat.

No	Kab./Kota	Target (hutan adat)	SK MHA	Kendala
1	Kab. Sarolangun	20	SK Bupati Sarolangun No. 026/Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 luas 1.368 Ha	Pengesahan peta belum selesai
2	Kab. Sarolangun	6	SK Bupati Merangin No. 95 Tahun 2002 luas 3.447 Ha	
3	Kab. Kerinci	9	SK Bupati KDH TK II Kerinci No. 96 Tahun 1994 tgl 10 Mei 1994, luas 1.920 Ha	
4	Kab. Bungo	8	SK Bupati No. 1249 Tahun 2002 Tgl 16 Juli 2002, luas 3.399 Ha	

Sasaran Strategis 5				
Menyusun naskah kebijakan perencanaan perlindungan lingkungan hidup				
a. Jumlah inventarisasi data dan pembinaan pengelolaan sampah	11 kab/kota	11 kab/kota	100	Baik
b. Jumlah penilaian adipura	4 kab/kota	4 kab/kota	100	Baik
a. Jumlah pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (PEP RAD GRK) Sektor Limbah dan Sistem Informasi Gas Rumah Kaca Nasional Sederhana, Mudah, Akurat, Ringkas dan Transparan (SIGN SMART)	11 kab/kota	11 kab/kota	100	Baik

b. Jumlah Pembinaan Kegiatan Proklamasi	17 Desa	2 Desa	11,76	Tidak Baik
c. Jumlah Identifikasi KEHATI Provinsi Jambi	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	100	Baik
a. Jumlah validasi dan Rapat Koordinasi KLHS	Tentative	2 kab. (Kerinci dan Merangin)	100	Baik
b. Jumlah penyusunan Rencana Naskah Akademik Kebijakan NSDA Provinsi Jambi	1 dokumen	1 dokumen	100	Baik
c. Jumlah Inventarisasi SDA Provinsi Jambi	1 dokumen	1 dokumen	100	Baik
d. Jumlah Inventarisasi Peta SDA berbasis GIS	1 dokumen	1 dokumen	100	Baik
e. Jumlah Penyusunan Naskah Akademik RPPLH	1 dokumen	1 dokumen	100	Baik
f. Jumlah Ketersediaan dan Interpretasi ZAE	1 dokumen	1 dokumen	100	Baik

IK – 1 :

Jumlah inventarisasi data dan pembinaan pengelolaan sampah

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
a. Jumlah inventarisasi data dan pembinaan pengelolaan sampah	11 kab/kota	11 kab/kota	100	Baik

1. Terlaksananya (100%) Pengambilan Data di 11 Kab/Kota untuk bahan penyusunan Jakstrada Provinsi Jambi (Peraturan Gubernur tentang Jakstrada Pengelolaan Sampah Provinsi Jambi). Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terukur, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Dimana kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud, jakstrada menjadi pedoman pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya untuk menyusun kebijakan dan strategi daerah masing-masing, maka diperlukan data pendukung dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga guna untuk penyusunan kebijakan strategi daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun jakstrada. Jakstrada dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025. Capaian target sampai tahun 2025 mampu menurunkan timbulan sampah menjadi 30 %. Penyusunan Jakstrada di Provinsi Jambi masih dalam proses koreksi dari KLHK dan belum ditandatangani oleh Gubernur Jambi (Batas akhir penyelesaian Jakstrada tentang Pengelolaan Sampah sampai tanggal 31 Oktober 2018, tetapi untuk provinsi Jambi Peraturan Bupati/Walikota yang sudah ditandatangani oleh Bupati/walikota yaitu Kab. Bungo, Kab. Merangin, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun, Kota Jambi dan Kota Sei Penuh. Untuk Kabupaten Kota yang lain dalam tahap proses koreksi ke bagian Hukum setempat.

2. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Sampah dan Kegiatan Penyusunan Kebijakan strategi pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan sebanyak 2 kali (100%) yaitu :
 1. Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Persampahan dilaksanakan oleh DLH Provinsi, LH kabupaten/kota, Dinas PUPR/Perkim serta Bappeda kabupaten/kota dengan agenda bagaimana tata cara penyusunan jakstrada di wilayah masing-masing kabupaten/kota.

Melakukan Sosialisasi Pengelolaan Persampahan di Tanjab Timur bersamaan rangkaian kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat XIV PKK ke 45 dan TTG Tahun 2017 di Provinsi Jambi.

IK – 2 :
Jumlah penilaian adipura

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
b. Jumlah penilaian adipura	4 kab/kota	4 kab/kota	100	Baik

Penilaian Adipura pada tahun 2018 dilakukan pemantauan 2(dua) kali yaitu Tahap II (P2) untuk penilaian periode 2017 -2018 dan Tahap I (P1) untuk penilaian Adipura periode 2018- 2019. Untuk periode 2017 – 2018 yang ikut penilaian Adipura ada 6 Kab/kota yaitu :

2. Kota Jambi
3. Kota Sei Penuh
4. Kab.Merangin
5. Kab.Sarolangun
6. Kab. Bungo
7. Kab. Batanghari

Dan yang masuk nominasi ada 3 (tiga) kabupaten/kota yaitu :

1. Kota Jambi
2. Kab. Merangin
3. Kab. Bungo.

- b. Untuk Tahap I (P1) penilaian Adipura periode 2018 -2019 sedianya dilaksanakan penilaian Adipura pada bulan Nopember 2018, tetapi pada tahun ini tidak dilaksanakan karena terjadinya perubahan pelaksanaan penilaian Adipura menjadi 1(satu) tahun anggaran yaitu tahun 2019.

Hasil penilaian yang menerima penghargaan Adipura periode 2017-2018 rencana akan diumumkan pada bulan Januari 2019, apabila telah membuat Peraturan Bupati dan

Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

IK – 3 :

Jumlah pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (PEP RAD GRK) Sektor Limbah dan Sistem Informasi Gas Rumah Kaca Nasional

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
a. Jumlah pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (PEP RAD GRK) Sektor Limbah dan Sistem Informasi Gas Rumah Kaca Nasional Sederhana, Mudah, Akurat, Ringkas dan Transparan (SIGN SMART)	11 kab/kota	11 kab/kota	100	Baik

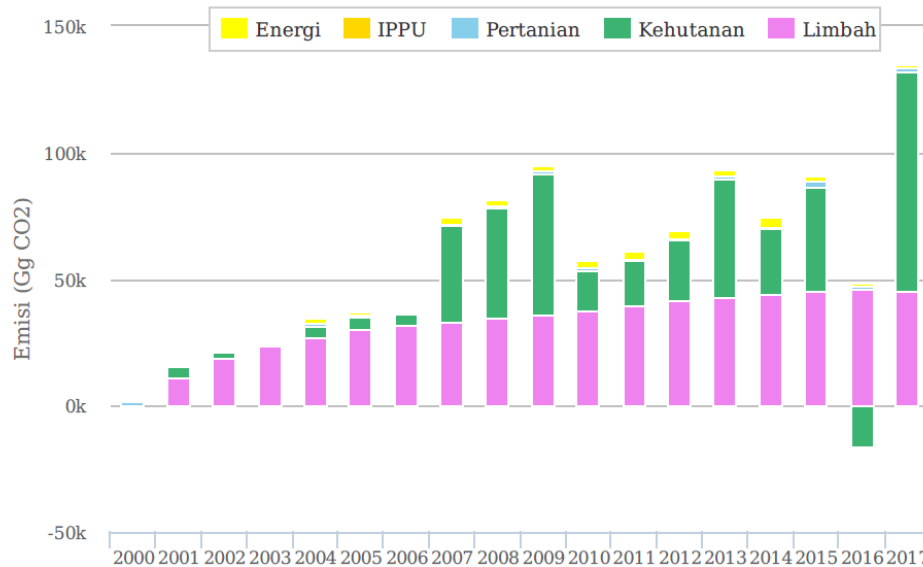
Rekap hasil inventarisasi tingkat emisi GRK Provinsi Jambi berdasarkan sektor dari tahun 2010 sampai dengan 2017 berdasarkan sektor menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan emisi GRK. Pada tahun 2010 tingkat emisi GRK sebesar 1.125,85 Gg CO₂-e, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 134.705,72 Gg CO₂-e .

Emisi GRK yang bersumber dari kehutanan dan limbah merupakan kontributor utama besarnya emisi GRK di Provinsi Jambi. Emisi GRK sektor kehutanan sebesar 87.182,31 Gg CO₂-e. Emisi terjadi karena adanya perubahan tutupan lahan akibat aktivitas pembangunan dan kebakaran gambut. Sedangkan emisi dari sector limbah sebesar 45.195,01 Gg CO₂-e. Emisi dari sector limbah terjadi karena peningkatan jumlah penduduk Provinsi Jambi sehingga limbah yang dihasilkan meningkat dan pengelolaan limbah tersebut belum mampu menurunkan emisi GRK.

Tingkat emisi GRK Provinsi Jambi dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Total Emisi GRK Provinsi Jambi

Emisi Sektor ENERGI, IPPU, PERTANIAN, KEHUTANAN, & LIMBAH

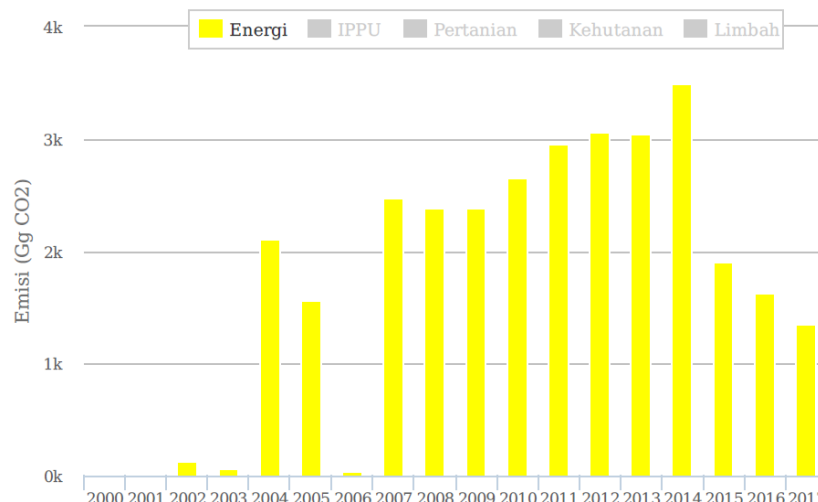


1.1 Grafik Total Emisi GRK Provinsi Jambi

Dari grafik tersebut tergambar bahwa terjadi peningkatan tingkat emisi GRK dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017, dimana tahun 2010 tingkat emisi GRK sebesar 1.125,85 Gg CO₂-e, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 134.705,72 Gg CO₂-e. Hal ini disebabkan karena peningkatan aktivitas di Provinsi Jambi namun belum diimbangi dengan kegiatan mitigasi yang bisa menurunkan emisi GRK tersebut.

b. Emisi GRK Sektor Energi

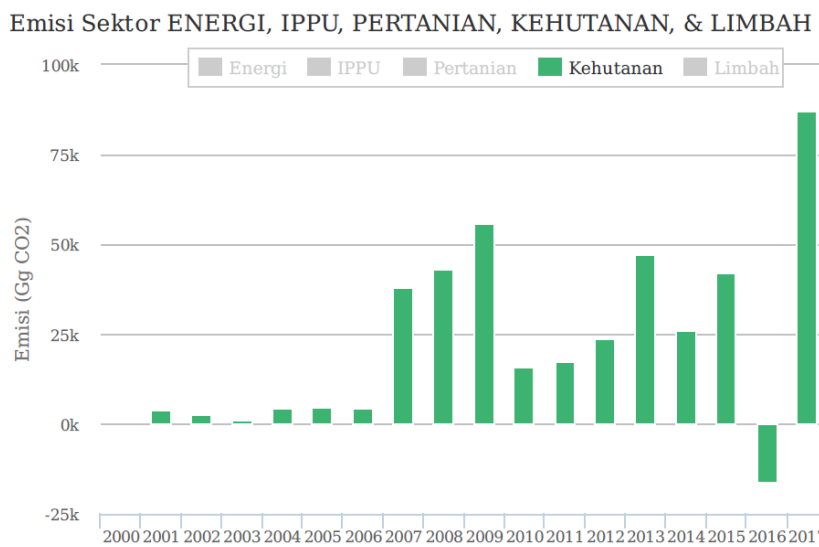
Emisi Sektor ENERGI, IPPU, PERTANIAN, KEHUTANAN, & LIMBAH



1.2 Grafik Emisi GRK Provinsi Jambi Sektor Energi

Dari gambar 2.2 di atas terlihat tingkat emisi GRK dari sector energy sebesar 1.341,25 Gg CO₂-e yang disebabkan dari penggunaan bahan bakar minyak (bbm) pada pembangkit listrik tenaga diesel dan konsumsi bbm untuk transportasi. Sampai saat ini, data disediakan oleh BP Migas hanya penggunaan bbm jenis premium dan solar untuk transportasi serta konsumsi kerosene (minyak tanah) untuk rumah tangga. Sedangkan jenis BBM lainnya belum disediakan secara rinci, sehingga inventarisasi tingkat emisi GRK sector energy harus tetap disempurnakan.

c. Emisi GRK Sektor Kehutanan



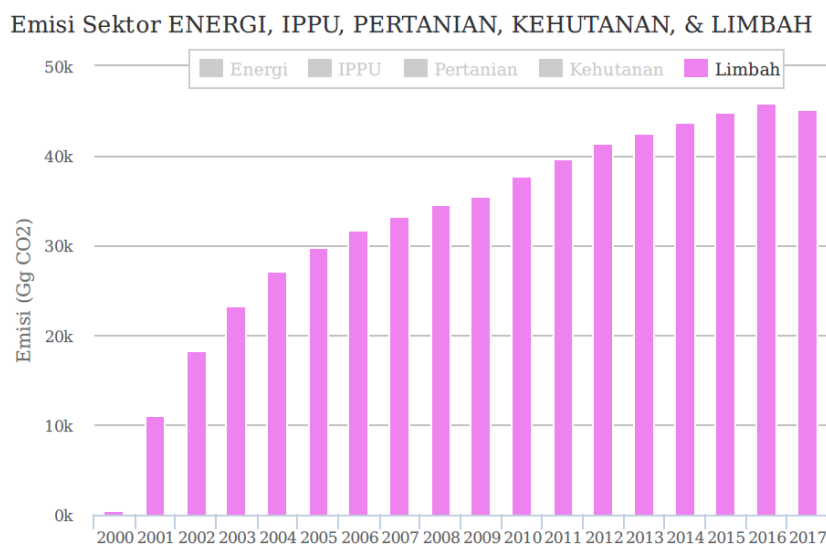
1.3 Grafik Emisi GRK Provinsi Jambi Sektor Kehutanan

Grafik tersebut menunjukkan tingkat emisi GRK dari sector kehutanan sebesar 87.182, 31 Gg CO₂-e yang disebabkan oleh perubahan tutupan lahan pada tanah

mineral dan gambut. Matriks transisi tutupan lahan pada tanah mineral dan gambut Provinsi Jambi terlampir.

Emisi GRK sector kehutanan juga disebabkan oleh kebakaran hutan seluas 510,0 ha pada lahan mineral dan 68,1 ha pada lahan gambut. Data kebakaran hutan Provinsi Jambi terlampir.

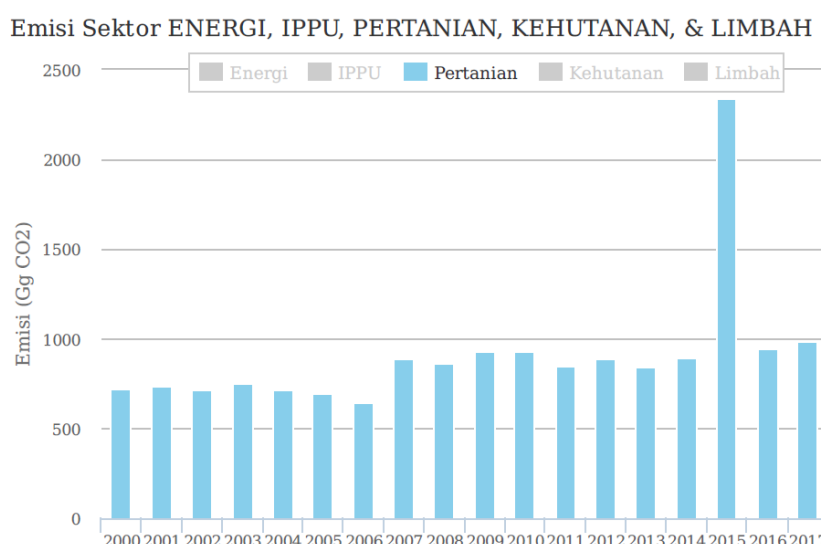
d. Grafik Emisi GRK Provinsi Jambi Sektor Limbah



1.4 Grafik Emisi GRK Provinsi Jambi Sektor Limbah

Dari grafik 2.4 dilihat emisi GRK dari sector limbah sebesar 45.195,01 Gg CO₂-e yang berasal dari limbah domestik padat dan cair penduduk Provinsi Jambi. Pengelolaan TPA yang belum menerapkan sanitary landfill menjadi penyumbang emisi GRK di Provinsi Jambi.

e. Emisi GRK Provinsi Jambi Sektor Pertanian



2.5 Grafik Emisi GRK Provinsi Jambi Sektor Pertanian

Grafik tersebut menunjukkan tingkat emisi GRK sector Pertanian sebesar 987,15 Gg CO₂-e.

IK – 4 :

Jumlah Pembinaan Kegiatan Proklam Sederhana, Mudah, Akurat, Ringkas dan Transparan (SIGN SMART)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Jumlah Pembinaan Kegiatan Proklam	17 Desa	2 Desa	11,76	Tidak Baik

Penurunan emisi GRK berbasis masyarakat dapat dilaksanakan dengan Program Kampung Iklim. Program Kampung Iklim (Proklam) merupakan Upaya memperkuat kemitraan berbagai pemangku kepentingan dalam menghadapi perubahan iklim serta memfasilitasi penyebaran dan pertukaran informasi mengenai upaya terbaik adaptasi dan perubahan iklim. Terdapat 35 lokasi proklam di Provinsi Jambi yang telah diregistrasi secara nasional yang terletak di Kabupaten Tanjabbar, Kabupaten Tanjabtim, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Bungo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin Dan Kota Jambi.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan penghargaan terhadap Kampung Iklim dengan jenis Proklam Pratama, Proklam Madya, Nominasi

Proklam Utama dan Nominasi Proklam Lestari sesuai dengan Permenlhk Nomor P.84/Menlhk-Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Program Kampung Iklim dan Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1/Ppi/Set/Kum.1/2/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Proklam.

Tahun 2018, Provinsi Jambi meraih penghargaan Proklam Kategori Proklam Utama untuk Desa Petajen Kabupaten Batanghari dan Desa Dataran Kampas Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Program Kampung Iklim di desa tersebut antara lain :

- Proklam Desa Petajen Kabupaten Batanghari :
 - Kegiatan Proklam ini dilakukan oleh Kelompok Tani Petajen yang dibina oleh DLH Kabupaten Batanghari.
 - Lokasi Proklam ini berlokasi di Dusun Meranti seluas $\pm$ 600 ha dengan jumlah penduduk KK $\pm$ 200 dan jumlah penduduk 800 jiwa. Sumber penghasilan utama adalah petani karet, PNS dan karyawan perusahaan sawit.
 - Mengumpulkan air hujan dengan bak permanen dan embung untuk kebutuhan sehari-hari.
 - Pengendalian kekeringan, banjir dan tanah longsor berupa lubang penampungan air dan lubang biopori hampir di tiap rumah, embung 2 unit, saluran pengelola air.
 - Peningkatan ketahanan pangan berupa penerapan pola tanam tumpang sari/tumpang gilir sebesar 10 % sebagai percontohan pemanfaatan lahan pekarangan.
 - Pengelolaan sampah, limbah padat dan cair berupa pengomposan, biogas dan kegiatan 3 R.
 - Melakukan larangan persiapan dan pembukaan lahan tanpa bakar, penghijauan, praktik wanatani.
 - Kelambagaan yang terbentuk dalam masyarakat bernama usaha tani maju.
 - Manfaat ekonomi yang paling dirasakan adalah pendapat masyarakat meningkat, kesuburan tanah, penyelamatan gagal panen, berkurangnya pengangguran.

- Tidak terdapat riwayat kejadian luar biasa penyakit terkait perubahan iklim seperti diare, DBD/DB, malaria.
- Pengendalian penyakit terkait iklim berupa pelaksanaan Program 3 M, pembentukan jumantik, pengelolaan limbah manusia, hewan dan industry yang efisien dan melaksanakan PHBS.
- Proklamasi Desa Dataran Kampas Kabupaten Tanjung Jabung Barat :
 - Kegiatan Proklamasi ini dilakukan oleh masyarakat Desa Dataran Kampas yang dibina oleh kegiatan CSR PT. WKS.
 - Lokasi Proklamasi ini seluas ± 428 ha dengan jumlah penduduk KK ± 513 dan jumlah penduduk 1.900 jiwa. Sumber penghasilan utama adalah pertanian, perikanan, peternakan, dan tenaga kerja harian perusahaan.
 - Mengumpulkan air hujan dengan embung dan sumur bor untuk kebutuhan sehari-hari.
 - Pengendalian kekeringan, banjir dan tanah longsor berupa lubang penampungan air 1 unit, sumur resapan 10 unit, gorong-gorong 2 unit, saluran pengaliran air 100 m.
 - Peningkatan ketahanan pangan berupa penerapan pola tanam tumpang sari/tumpang gilir sebesar 20 %, pertanian terpadu dan pengelolaan potensi lokal, pemanfaatan lahan pekarangan.
 - Pengelolaan sampah, limbah padat dan cair berupa pengomposan, biogas dan kegiatan 3 R.
 - Melakukan larangan persiapan dan pembukaan lahan tanpa bakar, penghijauan, praktik wanatani.
 - Kelambagaan yang terbentuk dalam masyarakat bernama Bumdes Gerbang Nusantara, Karang Taruna, Laskar Nusantara.
 - Manfaat ekonomi yang paling dirasakan adalah pendapat masyarakat meningkat, kesuburan tanah, penyelamatan gagal panen, berkurangnya pengangguran.
 - Tidak terdapat riwayat kejadian luar biasa penyakit terkait perubahan iklim seperti diare, DBD/DB, malaria.

Pengendalian penyakit terkait iklim berupa pelaksanaan Program 3 M, pembentukan jumatik, pengelolaan limbah manusia, hewan dan industry yang efisien dan melaksanakan PHBS.

IK – 5 :

Jumlah Identifikasi KEHATI Provinsi Jambi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
c. Jumlah Identifikasi KEHATI Provinsi Jambi	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	100	Baik

Pengelolaan danau secara khusus di Indonesia belum memiliki sejarah yang panjang seperti pengelolaan sungai. Danau masih sering diposisikan sebagai sumber air besar yang tidak ada habisnya. Kesepakatan Bali tahun 2009 tentang Pengelolaan Danau Berkelanjutan yang ditandatangani oleh 9 (Sembilan) Menteri pada Konferensi nasional Danau Indonesia I, telah memasuki era baru. Setelah pada tahun 2011 diluncurkan Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) di Semarang pada saat Konferensi Nasional Danau Indonesia II dan telah tersusunnya Rencana Aksi Penyelamatan Danau untuk 15 danau prioritas I yang meliputi Danau Toba, Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau Kerinci, Rawadanau, Danau Rawapening, Danau Sentarum, Danau Kaskade Mahakam (Semayang, Melintang, Jempang), Danau Limboto, Danau Poso, Danau Tempe, Danau Tondano, Danau Matano, Danau Batur dan Danau Sentani.

Tahun 2015-2019 merupakan periode implementasi Rencana Aksi Penyelamatan Danau Prioritas seperti yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dimana disebutkan bahwa salah satu Sasaran Utama Ketahanan Air adalah “Pengelolaan Kualitas Air Danau dengan indikator membaiknya Kualitas Air di 15 Danau” serta melaksanakan “Pengelolaan Danau Terpadu di 15 danau prioritas nasional”.

Di Provinsi Jambi, salah satu danau prioritas nasional adalah Danau Kerinci, yang mengalami pencemaran dari kegiatan pertanian di sekitar danau dengan indikasi ditemukannya kandungan mercury di dalam air danau kerinci, limbah domestik, sedimentasi dan lahan kritis di Daerah Tangkapan Air (DTA).

Dokumen Perencanaan Pengelolaan Danau Kerinci akan dituangkan ke dalam Peraturan Gubernur Jambi. Program dan kegiatan yang mendukung pengelolaan Danau Kerinci selanjutnya akan dilaksanakan oleh instansi terkait. Program dan kegiatan tersebut juga merupakan aksi mitigasi penurunan emisi GRK sector lahan yaitu reboisasi pada lahan kritis di Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Kerinci dan aksi mitigasi penurunan emisi GRK sector limbah yaitu pengelolaan limbah domestic masyarakat di sekitar Danau Kerinci.

IK – 6 :

Jumlah validasi dan Rapat Koordinasi KLHS

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
a. Jumlah validasi dan Rapat Koordinasi KLHS	Tentative	2 kab. (Kerinci dan Merangin)	100	Baik

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi merupakan salah satu instansi yang menjadi Perpanjangan tangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang bertugas memvalidasi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang di ajukan oleh kabupaten/kota dalam rangka menjamin kualitas kebijakan rencana program dalam setiap rencana pembangunan agar mengurangi dampak dan resiko lingkungan yang akan terjadi, berkaitan dengan tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup maka dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi melalui Subbid Inventarisasi Lingkungan Pada Bidang Tata Lingkungan melaksanakan Validasi Dokumen KLHS RPJMP Kabupaten tanjung Jabung Barat tahun 2005-2025.

Berkaitan dengan hasil konsolidasi di atas Subbid inventarisasi lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah melaksanakan sosialisasi dan pembinaan KLHS RPJMD di Kabupaten yang telah melaksanagn pilkada serentak di tahun 2018 yaitu Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin.

IK – 7 :

Jumlah dokumen kajian LH

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
b. Jumlah penyusunan Rencana Naskah Akademik Kebijakan NSDA Provinsi Jambi	1 dokumen	1 dokumen	100	Baik
c. Jumlah Inventarisasi SDA Provinsi Jambi	1 dokumen	1 dokumen	100	Baik
d. Jumlah Inventarisasi Peta SDA berbasis GIS	1 dokumen	1 dokumen	100	Baik
e. Jumlah Penyusunan Naskah Akademik RPPLH	1 dokumen	1 dokumen	100	Baik
f. Jumlah Ketersediaan dan Interpretasi ZAE	1 dokumen	1 dokumen	100	Baik

Jasa penyusunan rencana naskah akademik kebijakan NSDA Provinsi Jambi

Maksud pekerjaan ini adalah pelaksanaan program perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam untuk meningkatkan kinerja Pemerintah dalam rangka perlindungan Sumber Daya Alam dari Kerusakan dan mengelola kawasan konservasi.

Adapun tujuan dilaksanakannya pekerjaan ini, yaitu :

- Melakukan kajian terhadap kerangka pikir logis dan peta jalan neraca SDA di Provinsi Jambi.
- Melakukan kajian terhadap ketersediaan data SDA eksisting yang ada di Provinsi Jambi.
- Melakukan kajian terhadap penggunaan SNI perhitungan neraca SDA dalam konteks Provinsi Jambi.
- Melakukan kajian terhadap program dan kegiatan RKP berdasarkan Tupoksi seluruh SKPD/OPD di Provinsi Jambi.
- Menyusun naskah akademik kebijakan neraca SDA Provinsi Jambi.

3.5 Jasa inventarisasi NSDA Provinsi Jambi

Maksud dari pekerjaan ini adalah agar Pemerintah Provinsi Jambi memiliki suatu landasan kerangka pikir logis dan peta jalan menuju pola perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih memperhatikan kelestarian lingkungan.

Adapun tujuan dilaksanakannya pekerjaan ini, yaitu :

- a) Menyusun kerangka pikir logis dan peta jalan penyusunan neraca lingkungan di Provinsi Jambi.
- b) Menyusun contoh peta fungsi lingkungan Provinsi Jambi.
- c) Menyusun contoh pedoman perhitungan salah satu fungsi lingkungan Provinsi Jambi.
- d) Menyusun rekomendasi kebijakan dan kegiatan RKP berdasarkan kajian sinergi Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dengan kegiatan-kegiatan dalam Kerangka Pikir Logis (LFA) dan Peta Jalan penyusunan neraca lingkungan Provinsi Jambi.

3.6 Jasa inventarisasi peta SDA berbasis GIS

Maksud dan tujuan pekerjaan inventarisasi peta SDA berbasis *Geographic Information System* (GIS) adalah tersedianya data spatial yang dapat digunakan untuk menganalisa perencanaan pembangunan provinsi jambi agar sesuai dengan rencana pembangunan berkelanjutan.

Adapun tujuan dilaksanakannya pekerjaan ini, yaitu :

- a) Melakukan Inventarisasi terhadap peta Sumber Daya Alam (SDA) di Provinsi Jambi.
- b) Melakukan kajian terhadap peta SDA yang telah di inventarisasi.

3.7 Penyusunan Naskah Akademik RPPLH

Maksud pekerjaan ini adalah pelaksanaan program perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam untuk meningkatkan kinerja Pemerintah dalam rangka perlindungan Sumber Daya Alam dari Kerusakan dan mengelola kawasan konservasi.

Adapun tujuan dilaksanakannya pekerjaan ini, yaitu :

- a) Melakukan kajian literature terhadap seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pemanfaatan, pengelolaan, dan perlindungan lingkungan hidup di Provinsi Jambi;
- b) Melakukan konsultasi dengan seluruh instansi terkait dalam RPPLH;

- c) Melakukan kajian dan penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah mengenai RPPLH Provinsi Jambi.

3.8 Pengadaandan Interpretasi Peta ZAE

Maksud dan tujuan pekerjaan Pengadaan dan Interpretasi Peta Zona Agro Ekologi (ZAE) adalah tersedianya peta Zona Agro Ekologi (ZAE) Provinsi Jambi untuk mewujudkan perencanaan penggunaan lahan yang baik dan berkelanjutan.

Adapun tujuan dilaksanakannya pekerjaan ini, yaitu :

- c) Melakukan kajian terhadap Peta Zona Agro Ekologi (ZAE) Provinsi Jambi.
- d) Melakukan kajian peta ZAE dengan data Peta daya Dukung Daya Tampung (DDDT) Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Sasaran Strategis 6				
• Meningkatkan frekuensi pemantauan kualitas air sungai • Meningkatkan frekuensi pemantauan kualitas udara • Meningkatkan pembinaan kegiatan usaha, masyarakat di sekitar sungai				
a. Jumlah Pemantauan Kualitas Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Jambi	2 kali di 7 Kab/kota	2 kali di 7 Kab/kota	100	Baik
b. Jumlah Pemantauan Kualitas Udara Ambeien di Wilayah Provinsi Jambi	2 kali di 11 Kab/kota	2 kali di 11 Kab/kota	100	Baik
c. Jumlah pelaksanaan Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi Pemantauan Kualitas Lingkungan	4 kali	4 kali	100	Baik
d. Jumlah pemantauan Kualitas Air Laut	1 kali di 2 Kab/kota	1 kali di 2 Kab/kota	100	Baik
e. Jumlah pemantauan Kualitas Air Danau	2 kali di 2 Kab/kota	1 kali di 2 Kab/kota	50	Kurang baik

IK – 1 :
Jumlah Pemantauan Kualitas Air Sungai Lintas

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
a. Jumlah Pemantauan Kualitas Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Jambi	2 kali di 7 Kab/kota	2 kali di 7 Kab/kota	100	Baik

Jumlah lokasi titik sampling dan titik koordinat masih sama dengan tahun 2017 yaitu:

1. Batang merangin (outlet danau Kerinci) di Desa Sanggaran Agung Kabupaten Kerinci.
2. Batang Merangin di Desa Muara Hemat Kabupaten Merangin.
3. Batang Merangin (outlet batang masumai) di Kelurahan Pasar Bangko Kabupaten Merangin.
4. Pertemuan Batang Asai dengan Batang Limun (outlet Batang Asai) di Desa Pulau Pandan Kabupaten Sarolangun.
5. Pertemuan Batang Merangin dengan Batang Tembesi (outlet Batang Merangin) di Desa Batu Kucing Kabupaten Sarolangun.
6. Pertemuan Batang Tembesi dengan Batang Limun (outlet Batang Limun) di Desa Sarolangun Kembang Kabupaten Sarolangun.
7. Batang Tebo (outlet Batang Bungo) di Desa Tanjung Gedang Kabupaten Bungo.
8. Sungai Pelepat di Desa Muaro Kuamang Kabupaten Bungo.
9. Batang Tebo (outlet Batang Tebo) di Desa Mangun Jayo Kabupaten Tebo.
10. Batang Sumay (outlet Batang Sumay) di Desa Teluk Singkawang Kabupaten Tebo.
11. Batang Tabir (outlet Batang Tabir) di Dusun Tuo Desa Peninjauan Kabupaten Batanghari.
12. Batang Tembesi (outlet Batang Tembesi) di Kelurahan Pasar Muaro Tembesi Kabupaten Batanghari.

I.1.1. Hasil Pemantauan Lapangan

A. Sungai Lintas Kabupaten/Kota

Parameter lapangan yang diukur adalah suhu, pH dan Oksigen terlarut. Hasil pemantauan parameter lapangan untuk semua lokasi pemantauan dapat dilihat pada tabel 8 sampai dengan 19.

Tabel 8. Hasil pemantauan lapangan di Desa Sanggaran Agung Kabupaten Kerinci

No	Pengamatan Lapangan	Keterangan	
		Tahap 1	Tahap 2
1.	Nama Sungai	Batang Merangin (Outlet Danau Kerinci)	
2.	Keadaan visualitas sungai		
	1. Warna Air	Jernih	Jernih

	2. Kecepatan arus	Deras	Deras
3.	Keadaan cuaca	Cerah	Cerah
4.	Hasil pemeriksaan parameter lapangan		
	1. Suhu udara (°C)	30.5	28.2
	2. Suhu air (°C)	28.6	28.2
	3. pH	7.96	7.09
	4. Daya Hantar Listrik (DHL)		
	5. Dissolved Oxygen (DO)	7.04	6.8
	6. Kecepatan arus (m/det)		
5.	Aktifitas disekitar lokasi sampling:		
	Tahap 1	Tahap 2	
	- Air sungai keruh dan arus deras	- Ada kerambah ikan - Ada aktifitas pencari ikan - Disekitar sungai ada persawahan, semak belukar dan rumah penduduk	

Dari hasil pemantauan dilapangan kondisi Air Sungai Batang Merangin di Lokasi Desa Sanggaran Agung pada setiap periode pemantauan dalam keadaan jernih, suhu udara berkisar antara 28.2 – 30.5 °C, suhu air berkisar antara 28,2 – 28,5°C dan pH air berkisar antara 7.09 – 7.96 dan oksigen terlarut (DO) berkisar antara 6.8 – 7.04. Kondisi ini menunjukan untuk parameter lapangan pemantauan air sungai Batang Merangin memenuhi baku mutu.

Tabel 9. Hasil pemantauan lapangan di Muara Emat Kabupaten Merangin

No	Pengamatan Lapangan	Keterangan	
		Tahap 1	Tahap 2
1.	Nama Sungai	Batang Merangin	
2.	Keadaan visualitas sungai		
	1. Warna Air	Jernih	Jernih
	2. Kecepatan arus	Deras	Deras
3.	Keadaan cuaca	Cerah	Cerah
4.	Hasil pemeriksaan parameter lapangan		
	1. Suhu udara (°C)	28.4	30.3
	2. Suhu air (°C)	25.5	30.1
	3. pH	7.6	7.34
	4. Daya Hantar Listrik (DHL)		
	5. Dissolved Oxygen (DO)	7.04	6.6
	6. Kecepatan arus (m/det)		

5.	Aktifitas disekitar lokasi sampling:	
	Tahap 1	Tahap 2
	- Air sungai keruh dan arus deras - Ada tempat mandi dan jamban dihilu dan hilir sungai - Sisi kanan dan kiri Sungai ada semak belukar dan rumah penduduk	- Air sungai keruh dan arus deras - Ada tempat mandi dan jamban dihilu dan hilir sungai - Sisi kanan dan kiri Sungai ada semak belukar dan rumah penduduk

Dari hasil pemantauan dilapangan kondisi Air Sungai Batang Merangin di Lokasi Desa Muara Emat pada setiap periode pemantauan dalam keadaan jernih, suhu udara berkisar antara 28.4 – 30.3 °C, suhu air berkisar antara 25.5 – 30.1°C dan pH air berkisar antara 7.34 – 7.6 dan oksigen terlarut (DO) berkisar antara 6.6 – 7.04. Kondisi ini menunjukan untuk parameter lapangan pemantauan air sungai Batang Merangin memenuhi baku mutu.

Tabel 10. Hasil pemantauan lapangan di Kelurahan Pasar Bangko Kabupaten Merangin

No	Pengamatan Lapangan	Keterangan	
		Tahap 1	Tahap 2
1.	Nama Sungai	Batang Merangin	
2.	Keadaan visualitas sungai		
	1. Warna Air	Keruh	Keruh
	2. Kecepatan arus	Sedang	Deras
3.	Keadaan cuaca	Cerah	Cerah
4.	Hasil pemeriksaan parameter lapangan		
	1. Suhu udara (°C)	28.1	29
	2. Suhu air (°C)	26.3	29.1
	3. pH	7.8	7.61
	4. Daya Hantar Listrik (DHL)		
	5. Dissolved Oxygen (DO)	6.94	6.2
	6. Kecepatan arus (m/det)		
5.	Aktifitas disekitar lokasi sampling:		
	Tahap 1	Tahap 2	
	- Air sungai keruh dan arus deras	- Arus sedang - Dikiri kanan sungai ada pepohonan	

Dari hasil pemantauan dilapangan kondisi Air Sungai Batang Merangin di Lokasi Kelurahan Pasar Bangko pada setiap periode pemantauan dalam keadaan keruh, suhu udara berkisar antara 28.1 – 29 °C, suhu air berkisar antara 26.3 – 29.1°C dan pH air berkisar antara 7.61 – 7.8 dan oksigen terlarut (DO) berkisar antara 6.2 – 6.94. Kondisi ini

menunjukkan untuk parameter lapangan pemantauan air sungai Batang Merangin memenuhi baku mutu.

Tabel 11. Hasil pemantauan lapangan di Desa Pulau Pandan Kabupaten Sarolangun

No	Pengamatan Lapangan	Keterangan	
		Tahap 1	Tahap 2
1.	Nama Sungai	Batang Limun	
2.	Keadaan visualitas sungai		
	1. Warna Air	Keruh	Keruh
	2. Kecepatan arus	Deras	Sedang
3.	Keadaan cuaca	Mendung	Cerah
4.	Hasil pemeriksaan parameter lapangan		
	1. Suhu udara (°C)	36.5	31.2
	2. Suhu air (°C)	28.1	28.3
	3. pH	7.51	7.92
	4. Daya Hantar Listrik (DHL)		
	5. Dissolved Oxygen (DO)	6.12	6.6
	6. Kecepatan arus (m/det)		
5.	Aktifitas disekitar lokasi sampling:		
	Tahap 1	Tahap 2	
	- Air sungai keruh dan arus deras - Ada tempat mandi dan jamban dihilu sungai - Sisi kanan dan kiri Sungai ada semak belukar dan rumah penduduk - Dihulu sungai terdapat aktifitas PETI	- Air sungai keruh dan arus deras - Ada tempat mandi dan jamban dihilu sungai - Sisi kanan dan kiri Sungai ada semak belukar dan rumah penduduk - Dihulu sungai terdapat aktifitas PETI	

Dari hasil pemantauan dilapangan kondisi Air Sungai Batang Limun di Lokasi Desa Pulau Pandan pada setiap periode pemantauan dalam keadaan keruh, suhu udara berkisar antara 31.2 – 36.5 °C, suhu air berkisar antara 28.1 – 28.3 °C dan pH air berkisar antara 7.51 – 7.92 dan oksigen terlarut (DO) berkisar antara 6.12 – 6.6. Kondisi ini menunjukkan untuk parameter lapangan pemantauan air sungai Batang Limun untuk parameter suhu belum memenuhi baku mutu.

Tabel 12. Hasil pemantauan lapangan di Desa Batu Kucing Kabupaten Sarolangun

No	Pengamatan Lapangan	Keterangan	
		Tahap 1	Tahap 2

1.	Nama Sungai	Batang Tembesi	
2.	Keadaan visualitas sungai		
	1. Warna Air	Keruh	Keruh
	2. Kecepatan arus	Sedang	Sedang
3.	Keadaan cuaca	Cerah	Cerah
4.	Hasil pemeriksaan parameter lapangan		
	1. Suhu udara (°C)	30.9	26.6
	2. Suhu air (°C)	28.9	25
	3. pH	8.16	6.2
	4. Daya Hantar Listrik (DHL)		
	5. Dissolved Oxygen (DO)	6.33	6.12
	6. Kecepatan arus (m/det)		
5.	Aktifitas disekitar lokasi sampling:		
	Tahap 1	Tahap 2	
	- Air sungai keruh, pasang - Ada tempat mandi dan jamban dihilu sungai - Sisi kanan dan kiri Sungai ada semak belukar dan rumah penduduk - Dihulu sungai terdapat aktifitas PETI	- Air sungai keruh dan arus lambat - Ada tempat mandi dan jamban - Dikiri kanan sungai ada pepohonan, semak belukar dan rumah penduduk	

Dari hasil pemantauan dilapangan kondisi Air Sungai Batang Tembesi di Lokasi Desa Batu Kucing pada setiap periode pemantauan dalam keadaan keruh, suhu udara berkisar antara 26.6 – 30.9 °C, suhu air berkisar antara 25 – 28.9 °C dan pH air berkisar antara 6.2 – 8.16 dan oksigen terlarut (DO) berkisar antara 6.12 – 6.33. Kondisi ini menunjukan untuk parameter lapangan pemantauan air sungai Batang Tembesi memenuhi baku mutu.

Tabel 13. Hasil pemantauan lapangan di Desa Sarolangun Kembang Kabupaten Sarolangun

No	Pengamatan Lapangan	Keterangan	
		Tahap 1	Tahap 2
1.	Nama Sungai	Batang Tembesi	
2.	Keadaan visualitas sungai		
	1. Warna Air	Keruh	Keruh
	2. Kecepatan arus	Sedang	Sedang
3.	Keadaan cuaca	Cerah	Cerah
4.	Hasil pemeriksaan parameter lapangan		
	1. Suhu udara (°C)	31.2	26.9
	2. Suhu air (°C)	28,9	25
	3. pH	7.4	6,0

	4. Daya Hantar Listrik (DHL)		
	5. Dissolved Oxygen (DO)	5.92	5.91
	6. Kecepatan arus (m/det)		
5.	Aktifitas disekitar lokasi sampling:		
	Tahap 1	Tahap 2	
	- Air sungai keruh, pasang - Ada tempat mandi dan jamban dihilu sungai - Sisi kanan dan kiri Sungai ada semak belukar dan rumah penduduk - Dihulu sungai terdapat aktifitas PETI	- Air sungai keruh - Ada tempat mandi dan jamban dihilu sungai - Sisi kanan dan kiri Sungai ada semak belukar dan rumah penduduk - Dihulu sungai terdapat aktifitas PETI	

Dari hasil pemantauan dilapangan kondisi Air Sungai Batang Tembesi di Lokasi Desa Sarolangun Kembang pada setiap periode pemantauan dalam keadaan keruh, suhu udara berkisar antara 26.9– 31.2 °C, suhu air berkisar antara 25 – 28.9 °C dan pH air berkisar antara 6 – 7.4 dan oksigen terlarut (DO) berkisar antara 5.91 – 5.92. Kondisi ini menunjukan untuk parameter lapangan pemantauan air sungai Batang Tembesi memenuhi baku mutu.

Tabel 14. Hasil pemantauan lapangan di Desa Tanjung Gedang Kabupaten Bungo

No	Pengamatan Lapangan	Keterangan	
		Tahap 1	Tahap 2
1.	Nama Sungai	Batang Tebo	
2.	Keadaan visualitas sungai		
	1. Warna Air	Keruh	Keruh
	2. Kecepatan arus	Deras	Sedang
3.	Keadaan cuaca	Cerah	Cerah
4.	Hasil pemeriksaan parameter lapangan		
	1. Suhu udara (°C)	26.9	29.3
	2. Suhu air (°C)	26.7	26.7
	3. pH	6.3	7.68
	4. Daya Hantar Listrik (DHL)		
	5. Dissolved Oxygen (DO)	5.71	6.43
	6. Kecepatan arus (m/det)		
5.	Aktifitas disekitar lokasi sampling:		
	Tahap 1	Tahap 2	
	- Arus deras - Ada tempat mandi dan jamban - Sisi kanan dan kiri Sungai ada pepohonan, semak belukar dan pemukiman penduduk	- Arus lambat - Ada tempat mandi dan jamban - Sisi kanan dan kiri Sungai ada pepohonan dan pemukiman penduduk	

- Terdapat WC apung	- Terdapat WC apung
---------------------	---------------------

Dari hasil pemantauan dilapangan kondisi Air Sungai Batang Tebo di Lokasi Desa Tanjung Gedang pada setiap periode pemantauan dalam keadaan keruh, suhu udara berkisar antara 26.9 – 29.3 °C, suhu air berkisar antara 26.7 °C dan pH air berkisar antara 6.3 – 7.68 dan oksigen terlarut (DO) berkisar antara 5.71 – 6.43. Kondisi ini menunjukan untuk parameter lapangan pemantauan air sungai Batang Tebo memenuhi baku mutu.

Tabel 15. Hasil pemantauan lapangan di Desa Muaro Kuamang Kabupaten Bungo

No	Pengamatan Lapangan	Keterangan	
		Tahap 1	Tahap 2
1.	Nama Sungai	Sungai Pelepat	
2.	Keadaan visualitas sungai		
	1. Warna Air	Keruh	Keruh
	2. Kecepatan arus	deras	Sedang
3.	Keadaan cuaca	Cerah	Cerah
4.	Hasil pemeriksaan parameter lapangan		
	1. Suhu udara (°C)	30.6	30.3
	2. Suhu air (°C)	30.2	29.1
	3. pH	5.67	7.43
	4. Daya Hantar Listrik (DHL)		
	5. Dissolved Oxygen (DO)	5.1	6.33
	6. Kecepatan arus (m/det)		
5.	Aktifitas disekitar lokasi sampling:		
	Tahap 1	Tahap 2	
	- Arus deras - Sisi kanan dan kiri Sungai ada pepohonan, semak belukar dan pemukiman penduduk	- Arus lambat - Sisi kanan dan kiri Sungai ada pohon dan semak belukar	

Dari hasil pemantauan dilapangan kondisi Air Sungai Pelepat di Lokasi Desa Muaro Kuamang pada setiap periode pemantauan dalam keadaan keruh, suhu udara berkisar antara 30.3 – 30.6 °C, suhu air berkisar antara 29.1 – 30.2 °C dan pH air berkisar antara 5.67 – 7.43 dan oksigen terlarut (DO) berkisar antara 5.1 – 6.33. Kondisi ini menunjukan untuk parameter lapangan pemantauan air sungai Pelepat untuk parameter pH belum memenuhi baku mutu.

Tabel 16. Hasil pemantauan lapangan di Desa Mangun Jayo Kabupaten Tebo

No	Pengamatan Lapangan	Keterangan	
		Tahap 1	Tahap 2
1.	Nama Sungai	Batang Tebo	
2.	Keadaan visualitas sungai		
	1. Warna Air	Keruh	Keruh
	2. Kecepatan arus	Sedang	Sedang
3.	Keadaan cuaca	Cerah	Cerah
4.	Hasil pemeriksaan parameter lapangan		
	1. Suhu udara ($^{\circ}\text{C}$)	27.8	30.7
	2. Suhu air ($^{\circ}\text{C}$)	27.3	30.2
	3. pH	5.81	7.51
	4. Daya Hantar Listrik (DHL)		
	5. Dissolved Oxygen (DO)	5.1	6.12
	6. Kecepatan arus (m/det)		
5.	Aktifitas disekitar lokasi sampling:		
		Tahap 1	Tahap 2
	- Air sungai keruh dan arus lambat - Dikiri kanan sungai ada pepohonan dan rumah penduduk - Dihulu sungai ada perkebunan kelapa sawit	- Arus lambat - Sisi kanan dan kiri Sungai ada pohon dan semak belukar	

Dari hasil pemantauan dilapangan kondisi Air Sungai Batang Tebo di Lokasi Desa Mangun Jayo pada setiap periode pemantauan dalam keadaan keruh, suhu udara berkisar antara 27.8 – 30.7 $^{\circ}\text{C}$, suhu air berkisar antara 27.3 – 30.2 $^{\circ}\text{C}$ dan pH air berkisar antara 5.81 – 7.51 dan oksigen terlarut (DO) berkisar antara 5.1 – 6.12. Kondisi ini menunjukkan untuk parameter lapangan pemantauan air sungai Batang Tebo untuk parameter pH belum memenuhi baku mutu.

Tabel 17. Hasil pemantauan lapangan di Desa Teluk Singkawang Kabupaten Tebo

No	Pengamatan Lapangan	Keterangan	
		Tahap 1	Tahap 2
1.	Nama Sungai	Batang Sumay	
2.	Keadaan visualitas sungai		
	1. Warna Air	Keruh	Keruh
	2. Kecepatan arus	Sedang	Sedang
3.	Keadaan cuaca	Cerah	Cerah
4.	Hasil pemeriksaan parameter lapangan		
	1. Suhu udara ($^{\circ}\text{C}$)	32.1	31.6

	2. Suhu air (°C)	29.5	29.5
	3. pH	6.12	7.25
	4. Daya Hantar Listrik (DHL)		
	5. Dissolved Oxygen (DO)	5.92	6.33
	6. Kecepatan arus (m/det)		
5.	Aktifitas disekitar lokasi sampling:		
	Tahap 1	Tahap 2	
	- Air sungai keruh dan arus lambat - Ada tempat mandi dan jamban dihilu dan hilir sungai - Dikiri kanan sungai ada pepohonan dan rumah penduduk - Dihulu sungai ada perkebunan kelapa sawit	- Air sungai keruh dan arus lambat - Ada tempat mandi dan jamban - Dikiri kanan sungai ada pepohonan, semak belukar dan rumah penduduk	

Dari hasil pemantauan dilapangan kondisi Air Sungai Batang Sumay di Lokasi Desa Teluk Singkawang pada setiap periode pemantauan dalam keadaan keruh, suhu udara berkisar antara 31.6 – 32.1 °C, suhu air berkisar antara 29.5 °C dan pH air berkisar antara 6.12 – 7.25 dan oksigen terlarut (DO) berkisar antara 5.92 – 6.33. Kondisi ini menunjukan untuk parameter lapangan pemantauan air sungai Batang Sumay memenuhi baku mutu.

Tabel 18. Hasil pemantauan lapangan di Desa Dusun Tuo Peninjauan Kabupaten Batanghari

No	Pengamatan Lapangan	Keterangan	
		Tahap 1	Tahap 2
1.	Nama Sungai	Batang Tabir	
2.	Keadaan visualitas sungai		
	1. Warna Air	Keruh	Keruh
	2. Kecepatan arus	Sedang	Sedang
3.	Keadaan cuaca	Cerah	Cerah
4.	Hasil pemeriksaan parameter lapangan		
	1. Suhu udara (°C)	30.5	28.3
	2. Suhu air (°C)	28.7	27.9
	3. pH	6.23	7.65
	4. Daya Hantar Listrik (DHL)		
	5. Dissolved Oxygen (DO)	5.51	6.23
	6. Kecepatan arus (m/det)		
5.	Aktifitas disekitar lokasi sampling:		
	Tahap 1	Tahap 2	

- Arus deras - Ada tempat mandi dan jamban dihilu sungai - Sisi kanan dan kiri Sungai tebing, pepohonan, semak belukar dan pemukiman penduduk - Pada bagian hulu sungai terdapat aktifitas PETI	- Arus lambat - Di kiri kanan ada pohon dan semak belukar
--	--

Dari hasil pemantauan dilapangan kondisi Air Sungai Batang Tabir di Lokasi Desa Dusun Tuo Peninjauan pada setiap periode pemantauan dalam keadaan keruh, suhu udara berkisar antara 28.3 – 30.5 °C, suhu air berkisar antara 27.9 – 28.7 °C dan pH air berkisar antara 6.23 – 7.65 dan oksigen terlarut (DO) berkisar antara 5.51 – 6.23. Kondisi ini menunjukan untuk parameter lapangan pemantauan air sungai Batang Tabir memenuhi baku mutu.

Tabel 19. Hasil pemantauan lapangan di Desa Pasar Muara Tembesi Kabupaten Batanghari

No	Pengamatan Lapangan	Keterangan	
		Tahap 1	Tahap 2
1.	Nama Sungai	Batang Tembesi	
2.	Keadaan visualitas sungai		
	1. Warna Air	Keruh	Keruh
	2. Kecepatan arus	Sedang	Sedang
3.	Keadaan cuaca	Cerah	Cerah
4.	Hasil pemeriksaan parameter lapangan		
	1. Suhu udara (°C)	28.8	29.4
	2. Suhu air (°C)	28,2	28.4
	3. pH	6.55	7.28
	4. Daya Hantar Listrik (DHL)		
	5. Dissolved Oxygen (DO)	5.41	6.53
	6. Kecepatan arus (m/det)		
5.	Aktifitas disekitar lokasi sampling:		
	Tahap 1	Tahap 2	
	- Arus deras - Ada tempat mandi dan jamban dihilu sungai - Sisi kanan dan kiri Sungai tebing, pepohonan, semak belukar dan pemukiman penduduk - Banyak hewan sapi	- Ada limbah Domestik - Sisi kanan dan kiri Sungai ada pemukiman penduduk - Sisi kiri Sungai ada perkebunan masyarakat - pada badan air terdapat WC apung - Pada bagian hulu sungai terdapat	

- Pada bagian hulu sungai terdapat aktifitas PETI	aktifitas PETI
---	----------------

Dari hasil pemantauan lapangan kondisi Air Sungai Batang Tembesi di Lokasi Desa Pasar Muara Tembesi pada setiap periode pemantauan dalam keadaan keruh, suhu udara berkisar antara 28.8 – 29.4 °C, suhu air berkisar antara 28.2 – 28.4 °C dan pH air berkisar antara 6.55 – 7.28 dan oksigen terlarut (DO) berkisar antara 5.41 – 6.53. Kondisi ini menunjukan untuk parameter lapangan pemantauan air sungai Batang Tembesi memenuhi baku mutu.

IK – 2 :
Jumlah Pemantauan Kualitas Udara Ambeien

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
b. Jumlah Pemantauan Kualitas Udara Ambeien di Wilayah Provinsi Jambi	2 kali di 11 Kab/kota	2 kali di 11 Kab/kota	100	Baik

Hasil pemantauan kualitas udara ambient dengan menggunakan metoda passive sampler pada 11 kabupaten/kota di 4 lokasi sampling adalah sebagai berikut.

Tabel 34. Hasil pemantauan kualitas udara ambient di 11 Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Lokasi sampling	TAHAP I Kadar SO ₂	TAHAP II Kadar SO ₂	TAHAP I Kadar NO ₂	TAHAP II Kadar NO ₂
			µg/Nm ³	µg/Nm ³	µg/Nm ³	µg/Nm ³
1	KERINCI	A. Perkantoran	0.383	0.800	8.216	7.396
		B. Transportasi	0.459	0.729	19.711	22.114
		C. Pemukiman	0.565	0.982	0	11.944
		D. Industri/ Rumah Sakit	0.257	0.802	10.089	12.081
		BLANK				
2	MERANGIN	A. Perkantoran	0.193	0.825	10.98	9.953
		B. Transportasi	0.39	0.583	24.417	23.904
		C. Pemukiman	0.285	0.704	11.489	3.390

		D. Industri/ Rumah Sakit	0.394	0.945	11.378	18.766
		BLANK				
3	SAROLANGUN	A. Perkantoran	0.216	1.365	6.792	14.616
		B. Transportasi	0.278	0.566	15.389	19.993
		C. Pemukiman	0.554	0.400	10.292	8.803
		D. Industri/ Rumah Sakit	0.259	0.503	23.242	24.067
		BLANK				
4	BATANGHARI	A. Perkantoran	0	0.943	0	24.354
		B. Transportasi	1.319	1.432	39.662	38.363
		C. Pemukiman	0.077	1.956	13.509	18.780
		D. Industri/ Rumah Sakit	0.3	0.985	16.068	3.705
		BLANK				
5	MUARO JAMBI	A. Perkantoran	0.699	1.508	27.884	12.168
		B. Transportasi	0.816	1.840	26.264	39.730
		C. Pemukiman	0.577	0.612	15.512	25.656
		D. Industri/ Rumah Sakit	0.416	5.313	15.107	20.672
		BLANK				
6	TANJUNG JABUNG TIMUR	A. Perkantoran	0.438	1.604	13.744	10.583
		B. Transportasi	0.854	1.434	13.533	41.491
		C. Pemukiman	0.451	1.651	11.913	9.649
		D. Industri/ Rumah Sakit	0.533	2.293	10.057	11.417
		BLANK				
7	TANJUNG JABUNG BARAT	A. Perkantoran	1.051	1.412	16.997	18.844
		B. Transportasi	1.437	3.584	29.179	25.307
		C. Pemukiman	1.17	0.915	11.294	11.051
		D. Industri/ Rumah Sakit	2.481	4.951	18.513	27.031
		BLANK				
8	TEBO	A. Perkantoran	0.186	0.680	10.566	14.475
		B. Transportasi	0.257	0.882	19.102	14.857
		C. Pemukiman	0.331	0.617	11.36	2.909
		D. Industri/ Rumah	0.298	0	10.487	0

		Sakit				
		BLANK				
9	BUNGO	A. Perkantoran	0.324	1.115	12.402	14.229
		B. Transportasi	0.361	1.053	36.307	18.250
		C. Pemukiman	0.144	0.549	19.943	8.117
		D. Industri/ Rumah Sakit	0.506	0.937	12.518	11.120
		BLANK				
10	SUNGAI PENUH	A. Perkantoran	0.314	1.365	15.785	14.776
		B. Transportasi	0.545	0.566	37.357	17.228
		C. Pemukiman	0.345	0.400	9.734	9.588
		D. Industri/ Rumah Sakit	0.271	0.503	13.092	20.224
		BLANK				
11	KOTA JAMBI	A. Perkantoran	0.383	0.954	8.216	27.055
		B. Transportasi	0.459	1.405	19.711	53.959
		C. Pemukiman	0.565	1.241	0	32.252
		D. Industri/ Rumah Sakit	0.257	2.201	10.089	35.352
		BLANK				

Jika dibandingkan dengan standar baku mutu udara ambien sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara untuk parameter SO₂, NO₂ dan O₃ serta standar baku mutu tingkat kebauan untuk parameter NH₃ sesuai dengan Kepmenlh Nomor 50 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan, maka hasil pemantauan seluruh titik sampel di semua lokasi masih memenuhi baku mutu, tetapi pada tahap I masih terdapat data yang kosong dikarenakan alat pemantau (filter)nya hilang atau tidak kembali.

IK – 3 :

Jumlah pelaksanaan Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi Pemantauan Kualitas Lingkungan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
c. Jumlah pelaksanaan Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi Pemantauan Kualitas Lingkungan	4 kali	4 kali	100	Baik

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan tahun 2018, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah menyelenggarakan diseminasi hasil pemantauan kualitas air dan udara tahun 2018 di wilayah Provinsi Jambi sebanyak 2 kali pada tanggal 20 Juli 2018 dan 19 Desember 2018, peserta yang diundang adalah pejabat dan staf di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang menangani kegiatan pemantauan kualitas lingkungan.

Adapun materi yang disampaikan antarlain :

1. Hasil Pemantauan Kalitas air Sungai Batanghari tahun 2018.
2. Hasil Pemantauan Kualitas air Sungai Lintas Kabupaten/Kota tahun 2018.
3. Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambient tahun 2018.

Dan juga melalui kegiatan ini terjadi Diskusi hasil pemantauan kualitas air sungai dan udara serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan secara bersama antara Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

1.2. Bimbingan teknis pengambilan sampel air limbah

Kegiatan Bimbingan Teknis Pengambilan Sampel Air Limbah dan Air Sungai terhadap Perusahaan dalam Provinsi Jambi dilaksanakan pada :

- Hari/Tanggal : Rabu - Kamis, 2 – 3 Mei 2018
- Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
- Tempat : Aula DLH Provinsi Jambi dan PT. Djambi Waras

Dari jumlah 50 peserta perusahaan yang diundang, hadir mengikuti Bimtek tersebut sebanyak 42 peserta ditambah 14 orang peserta dari staf Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Adapun materi yang disampaikan antarlain :

1. Kebijakan pemantauan kualitas lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pemantauan air sungai dan air limbah.
3. Teknik sampling.
4. Wadah sampel dan pengawetan.
5. SNI terkait metoda pengambilan contoh air dan air limbah.

6. Pelaksanaan praktek pengambilan sampel air limbah dan air sungai di PT. Djambi Waras – Jambi.

Adapun hasil yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. agar petugas perusahaan yang melakukan pengambilan sampel air limbah dan air sungai mendapatkan hasil yang representatif, *personel qualified* dengan teknik sampling yang benar.

Peserta mengetahui persiapan yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan pengambilan sampel dan mampu mempraktekkan teknik sampling yang benar sesuai standar yang diajarkan oleh narasumber.

IK – 4 :

Jumlah pemantauan Kualitas Air Laut Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi Pemantauan Kualitas

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
d. Jumlah pemantauan Kualitas Air Laut	1 kali di 2 Kab/kota	1 kali di 2 Kab/kota	100	Baik

Sampel air yang diperoleh dari masing-masing lokasi sampling, dibawa ke Laboratorium Sucofindo untuk diuji. Hasil pengujian laboratorium terhadap sampel air danau pada masing-masing lokasi adalah pada tabel berikut.

Tabel 31. Kualitas air laut di Desa Kuala Lagan Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Desa Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO	PARAMETER	SATUAN	HASIL UJI		BAKU MUTU
			TEST RESULT		
		PARAMETERS	UNIT	1	2
I. Biologi					
1	Coliform	MPN/100 mL	< 1.8 ***	< 1.8 ***	1000
II. Fisika					
1	Brightness on site**	meter	0.5	0.5	> 3
2	Odor**	-	Odorless	Odorless	Odorless
3	TSS	mg / L	45	53	80
4	Floating Matter**	-	Nihil	Nihil	Nihil
5	Temperature on site**	°C	30	29.5	Natural
6	Oil Film**	-	Nihil	Nihil	Nihil

III. Kimia					
1	pH on site	-	8.02	7.82	6.5 - 8.5
2	Salinity	%	19	18	Natural
3	Amoniak (NH ₃ -N)	mg / L	<0.01	<0.01	0.3
4	Sulfide	mg / L	<0.001	<0.001	0.03
5	Polyaromatic Hydrocarbon (PAH)	mg / L	<0.001	<0.001	1
6	Phenol Compound**	mg / L	<0.003	<0.003	0.002
7	Polychlorinated Biphenyl (PCB)	mg / L	<0.001	<0.001	0.01
8	Surfactants Anionic (MBAS)	mg / L	<0.03	<0.03	1
9	Oil & Grease	mg / L	< 2	< 2	5
10	Tributyl Tin (TBT)**	mg / L	<0.001	<0.001	0.01
Heavy Metals					
1	Mercury**	mg / L	<0.0006	<0.0006	0.003
2	Cadmium	mg / L	<0.001	<0.001	0.01
3	Copper	mg / L	<0.01	<0.01	0.05
4	Lead	mg / L	<0.02	<0.02	0.05
5	Zinc	mg / L	0.060	0.050	0.1

Data pada tabel di atas adalah merupakan data dari laporan hasil uji (LHU) yang dikeluarkan oleh Laboratorium Sucofindo yang selanjutnya data-data ini akan dianalisa. Adapun analisa yang dipakai mengacu kepada Kepmen LH Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut lampiran I.

IK – 5 :

Jumlah pemantauan Kualitas Air Danau Lingkungan di Wilayah Provinsi Jambi Jambi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
e. Jumlah pemantauan Kualitas Air Danau	2 kali di 2 Kab/kota	1 kali di 2 Kab/kota	50	Kurang baik

Sampel air yang diperoleh dari masing-masing lokasi sampling, dibawa ke Laboratorium Sucofindo untuk diuji. Hasil pengujian laboratorium terhadap sampel air danau pada masing-masing lokasi adalah pada tabel berikut.

Tabel 30. Kualitas air Danau Baru di Desa Lidung Kabupaten Sarolangun dan Danau Kerinci di Desa Pulau Tengah Kabupaten Kerinci

No	Parameter	Satuan	Hasil Uji		KMA II
			DB	DK	

			1	2	1	2	
Biologi							
1	E - Coli	JPT / 100	100	200	1	250	1000
2	Total Coliform	JPT / 100	300	640	1	780	5000
Fisika							
1	Suhu (udara/air)	°C	31.4	34.30	26.5	28.80	Dev ± 3
2	TDS	mg / L	30	2656.00	73	2606.00	1000
3	TSS	mg / L	74	12.00	<10	< 10	50
Kimia							
1	pH	-	6.40	7.24	8.75	8.34	6.0 - 9.0
2	BOD ₅	mg / L	<2	6.03	<2	15.00	3
3	COD	mg / L	<3.76	13.10	<3.76	32.70	25
4	Oksigen Terlarut (DO)	mg / L	4.10	3.90	9.30	4.70	4
5	Total Fosfat (P)	mg / L	0.080	0.67	0.100	< 0.06	0.2
6	Nitrat (N)	mg / L	0.51	<0.15	0.24	12.40	10
7	Amoniak (NH ₃ -N)	mg / L	0.330	<0.01	0.260	<0.01	-
8	Arsenic Dissolved	mg / L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
9	Cobalt Dissolved	mg / L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0,2
10	Barium Dissolved	mg / L	<0.01	0.30	<0.01	<0.01	-
11	Boron Dissolved	mg / L	<0.02	0.09	<0.02	0.13	1
12	Selenium Dissolved	mg / L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05
13	Cadmium Dissolved	mg / L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
14	Chromium Hexavalent	mg / L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.05
15	Copper Dissolved	mg / L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02
16	Iron Dissolved	mg / L	0.760	2.84	0.040	0.18	-
17	Lead Dissolved	mg / L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03
18	Manganese Dissolved	mg / L	0.030	0.16	<0.01	0.04	-
19	Mercury Dissolved	mg / L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.002
20	Zinc Dissolved	mg / L	<0.01	0.04	<0.01	0.04	0.05
21	Chloride	mg / L	6.600	4.14	6.900	4.58	-
22	Cyanide	mg / L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02
23	Fluoride	mg / L	<0.06	0.22	<0.06	0.32	1.5
24	Nitrite (N)	mg / L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.06
25	Sulfate	mg / L	1.750	84.20	<0.77	0.84	-
26	Free Chlorine **	mg / L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03
27	Sulfur (H ₂ S)**	mg / L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002
28	Oil & Grease**	µg/L	<450	<450	<450	<450	1000
29	Surfactants Anionic (MBAS)	µg/L	<30	<30	<30	<30	200

30	Phenol Compound	µg/L	<0.75	<1	<0.75	<1	1
----	-----------------	------	-------	----	-------	----	---

Data pada tabel di atas adalah merupakan data dari laporan hasil uji (LHU) yang dikeluarkan oleh Laboratorium Sucofindo yang selanjutnya data-data ini akan digunakan untuk menentukan status mutu air. Adapun analisa yang dipakai untuk menentukan status mutu air adalah metode Indeks Pencemar sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Data hasil pengujian laboratorium dianalisa terhadap 7 (tujuh) parameter kunci berdasarkan Permen LHK nomor P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nilai dari setiap parameter dianalisa dengan metode indeks pencemar (IP) . Adapun hasil analisa dengan metode IP, diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut.

Tabel 32. Hasil Perhitungan dengan Metode Indeks Pencemar (IP) Sungai Lintas Kabupaten/Kota

No	Nama Sungai	Nama Titik Sampling	Bulan	Indeks Pencemar	Status	Parameter Melampaui Baku Mutu
1	Batang Merangin	Desa Sanggaran Agung	April	0.663157547	Memenuhi	---
2	Batang Merangin	Desa Muara Emat	April	0.647624339	Memenuhi	---
3	Batang Merangin	Kelurahan Pasar Bangko	April	1.279616779	Ringan	TSS
4	Batang Limun	Desa Pulau Pandan	April	2.400969522	Ringan	TSS
5	Batang Tembesi	Desa Batu Kucing	April	1.640975838	Ringan	TSS
6	Batang Tembesi	Desa Sarolangun Kembang	April	0.669914773	Memenuhi	---
7	Batang Tebo	Desa Tanjung Gedang	April	0.753981613	Memenuhi	---
8	Sungai Pelepat	Desa Muaro Kuamang	April	1.028251284	Ringan	TSS

9	Batang Tebo	Desa Mangun Jayo	April	1.105315445	Ringan	TSS
10	Batang Sumay	Desa Teluk Singkawang	April	0.764795724	Memenuhi	---
11	Batang Tabir	Dusun tuo Peninjauan	April	0.729304121	Memenuhi	---
12	Batang Tembesi	Desa Pasar Ma. Tembesi	April	0.825169882	Memenuhi	---
13	Batang Merangin	Desa Sanggaran Agung	Oktober	0.619537924	Memenuhi	---
14	Batang Merangin	Desa Muara Emat	Oktober	0.594473437	Memenuhi	---
15	Batang Merangin	Kelurahan Pasar Bangko	Oktober	0.656041369	Memenuhi	---
16	Batang Limun	Desa Pulau Pandan	Oktober	0.796148484	Memenuhi	---
17	Batang Tembesi	Desa Batu Kucing	Oktober	2.883254757	Ringan	Phosfat
18	Batang Tembesi	Desa Sarolangun Kembang	Oktober	0.761125201	Memenuhi	---
19	Batang Tebo	Desa Tanjung Gedang	Oktober	0.782842809	Memenuhi	---
20	Sungai Pelepat	Desa Muaro Kuamang	Oktober	0.650345806	Memenuhi	---
21	Batang Tebo	Desa Mangun Jayo	Oktober	2.150170216	Ringan	Phosfat
22	Batang Sumay	Desa Teluk Singkawang	Oktober	2.033537761	Ringan	Phosfat
23	Batang Tabir	Dusun tuo Peninjauan	Oktober	0.79591688	Memenuhi	---
24	Batang Tembesi	Desa Pasar Ma. Tembesi	Oktober	0.652553337	Memenuhi	---

Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode IP, diperoleh status mutu air pada ke 12 titik sampling yang dilakukan sebanyak 2 kali pemantauan adalah memenuhi dan cemar ringan. Parameter pencemar dominan adalah TSS dan Phosfat.

Tabel 33. Hasil Perhitungan dengan Metode Indeks Pencemar (IP) Danau

No	Nama Danau	Nama Titik Sampling	Bulan	Indeks Pencemar	Status	Parameter Melampaui Baku Mutu
1	Danau Baru	Desa Lidung	April	1.361777249	Ringan	TSS
2	Danau Kerinci	Desa Pulau Tengah	April	0.357762617	memenuhi	---
3	Danau Baru	Desa Lidung	Oktober	2.672790624	Ringan	DO, BOD, Phosfat
4	Danau Kerinci	Desa Pulau Tengah	Oktober	3.315584286	Ringan	BOD, COD

Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode IP, diperoleh status mutu air pada ke 12 titik sampling yang dilakukan sebanyak 2 kali pemantauan adalah memenuhi dan cemar ringan. Parameter pencemar dominan adalah TSS, DO, BOD, COD dan Phosfat.

Sasaran Strategis 7				
- Meningkatkan pembinaan ke dunia usaha/kegiatan limbah B3 - Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas pengelola LB3				
a. Jumlah pembinaan Pengelolaan B3 dan LB3 oleh Kegiatan Dunia Usaha/Kegiatan	45 dunia usaha/kegiatan	45 dunia usaha/kegiatan	100	Baik

IK – 1 :

Jumlah pembinaan Pengelolaan B3 dan LB3 oleh Kegiatan Dunia

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
a. Jumlah pembinaan Pengelolaan B3 dan LB3 oleh Kegiatan Dunia Usaha/Kegiatan	45 dunia usaha/kegiatan	46 dunia usaha/kegiatan	102	Sangat Baik

Kegiatan Pembinaan Pengelolaan B3 dan LB3 oleh Dunia Usaha/Kegiatan di Wilayah Provinsi Jambi

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya pembinaan Pengelolaan B3 dan LB3 terhadap dunia usaha. Kegiatan ini difokuskan pada kegiatan pembinaan terhadap penanggung jawab usaha potensial penghasil LB3 sebagai identifikasi kinerja

perusahaan dalam pengelolaan Limbah B3, rekapitulasi data limbah B3 berdasarkan sumber, dan jumlah perusahaan yang telah menyampaikan pelaporan Limbah B3 secara online melalui aplikasi Siraja Limbah.

Adapun penanggung jawab usaha yang diverifikasi dan yang telah dilakukan pembinaan pada tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.1. Pembinaan Pengelolaan B3 dan LB3 oleh Dunia Usaha/Kegiatan di Wilayah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Sektor	Kab/Kota
1	RS. St. Theresia	MPJ	Kota Jambi
2	PT. Putra Sumber Utama Timber	Industri Kayu Lapis	Kab. Muaro Jambi
3	PT. Erasakti Wira Forestama -1	Agroindustri	Kab. Muaro Jambi
4	PT. Bina Mitra Makmur	Agroindustri	Kab. Bungo
5	PT. Palma Abadi	Agroindustri	Kab. Tanjab Barat
6	PT. Sumbertama Nusa Pertiwi	Agroindustri	Kab. Muaro Jambi
7	PT. Ricky Kurniawan Kertapersada	Agroindustri	Kab. Muaro Jambi
8	PT. Aneka Bumi Pratama	Agroindustri	Kab. Batanghari
9	PT. Agro Mitra Madani	Agroindustri	Kab. Tanjab Barat
10	PT. Citra Koprasindo Tani	Agroindustri	Kab. Tanjab Barat
11	PT. Trimitra Lestari	Agroindustri	Kab. Tanjab Barat
12	PT. KDA Langling	Agroindustri	Kab. Merangin
13	PT. Anugrah Bungo Lestari	Agroindustri	Kab. Bungo
14	PT. Satya Kisma Usaha	Agroindustri	Kab. Tebo
15	PT. Bahana Karya Semesta	Agroindustri	Kab. Sarolangun
16	PT. Dasa Anugrah Sejati	Agroindustri	Kab. Tanjab Barat
17	PT. Graha Cipta Bangko Jaya	Agroindustri	Kab. Merangin
18	PT. Agrindo Pratama Tunggal Perkasa	Agroindustri	Kab. Sarolangun
19	PT. Primatama Kreasi Mas	Agroindustri	Kab. Sarolangun
20	PT. Bukit Kausar	Agroindustri	Kab. Tanjab Barat
21	PT. Produk Sawitindo Jambi	Agroindustri	Kab. Tanjab Barat
22	PT. Dharmasraya Palma Sejahtera	Agroindustri	Kab. Batanghari
23	PT. Palma Sukses Abadi	Agroindustri	Kab. Batanghari
24	PT. Nan Riang	PEM	Kab. Batanghari
25	PT. Bukit Tambi Tambang	PEM	Kab. Batanghari

26	PT. Agro Tumbuh Gemilang ABadi	Agroindustri	Kab. Tanjab Timur
27	PT. Surya Gemilang Agro Mandiri	Agroindustri	Kab. Tanjab Timur
28	PT. Erasakti Wira Forestama -2	Agroindustri	Kab. Muaro Jambi
29	PT. Erasakti Wira Forestama -3	Agroindustri	Kab. Muaro Jambi
30	PT. Batanghari Sawit Sejahtera	Agroindustri	Kab. Muaro Jambi
31	PT. Bukit Bintang Sawit	Agroindustri	Kab. Muaro Jambi
32	PT. Surya Cipta Wisesa	Transporter	Kota Jambi
33	PT. Surya Cipta Wisesa	Pengumpul	Kota Jambi
34	CV. Anggrek	Pengumpul	Kota Jambi
35	PT. Anggrek	Transporter	Kota Jambi
36	PT. Kenali Indah Sejahtera	Transporter	Kota Jambi
37	PT. Jamika Raya	Agroindustri	Kab. Bungo
38	PT. Megasawindo Perkasa POM	Agroindustri	Kab. Bungo
39	PT. Rigunas Agri Utama	Agroindustri	Kab. Tebo
40	PT. PN VI Rimbo Dua	Agroindustri	Kab. Tebo
41	PT. Geothermal Energy	PEM	Kab. Kerinci
42	PT. PN VI UU Kayu Aro	Agroindustri	Kab. Kerinci
43	PT. Rimba Hutani Mas	Agroindustri	Kab. Tanjab Barat
44	PT. Sari Aditya Loka-2	Agroindustri	Kab. Bungo
45	PT. SKU Pematang Gading	Agroindustri	Kab. Bungo
46	PT. PLN Sungai Gelam	PEM	Kab. Muaro Jambi

Detail dari hasil pembinaan Pengelolaan B3 dan LB3 oleh kegiatan usaha/industri di wilayah Provinsi Jambi diatas terlampir dalam form Data Pembinaan Pengelolaan Limbah B3 Provinsi Jambi Tahun 2018.

Untuk jumlah perusahaan yang sudah mendaftar melalui aplikasi Siraja Limbah sebanyak 107 perusahaan, sedangkan hasil rekapitulasi data limbah berdasarkan sumber dari aplikasi Siraja Limbah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Data Limbah B3 berdasarkan sumber oleh Dunia Usaha/Kegiatan di Wilayah Provinsi Jambi:

Dihasilkan (Ton)	Dikelola Lanjut Pihak ke-3 (Ton)	Disimpan di TPS LB3 (Ton)
101.526,9507	101.418,0126	108.9381

Sasaran Strategis 8
- Penguatan kapasitas kelembagaan pos pengaduan lingkungan hidup - Percepatan proses penanganan pengaduan

Persamaan persepsi dan peningkatan koordinasi dengan KLHK, DLH Kabupaten/Kota, dan Stakeholder. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan pengaduan, pengawasan, dan penegakan hukum. meningkatkan jumlah perusahaan yang "taat" dalam pengelolaan lingkungan. Persamaan persepsi dan peningkatan koordinasi dengan KLHK, DLH Kabupaten/Kota, dan Stakeholder. menurunkan beban pencemaran lingkungan				
a. Jumlah pelaksanaan penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%	100%	100	Baik
b. Jumlah pembinaan dan Pembentukan Pos Pengaduan Kabupaten/Kota	11 kab/kota	11 kab/kota	100	Baik
a. Jumlah pengawasan Terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Air, Udara, Tanah dan LB3)	75 perusahaan	63 perusahaan	84	Cukup Baik

IK – 1 :

Jumlah pelaksanaan penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
a. Jumlah pelaksanaan penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%	100%	100	Baik

3.1. Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

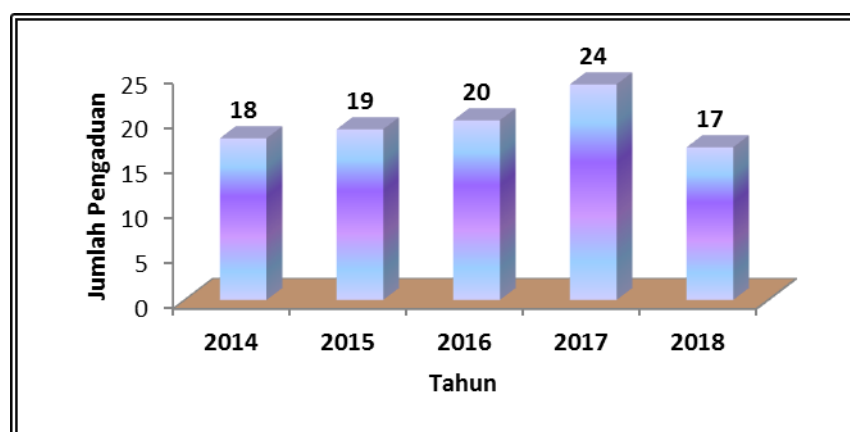
Pos Pengaduan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah menerima 17 (tujuh belas) pengaduan baik yang disampaikan secara lisan dengan mendatangi Pos Pengaduan, maupun lewat surat dan media elektronik. Penyampaian pengaduan secara lisan disampaikan langsung kepada petugas penerima pengaduan atau melalui telepon. Pengaduan tersebut dituangkan dalam formulir pengaduan. Dari 17 (tujuh belas) pengaduan yang diterima ini, 13 (tiga belas) pengaduan ditindaklanjuti dengan dana APBD Penanganan Pengaduan Tahun 2018.

Pos Pengaduan Lingkungan DLH Provinsi Jambi dalam 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2014-2018, telah menerima sebanyak 121 (seratus dua puluh satu)

pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan rincian seperti pada Tabel 3.1 dan Gambar 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Jumlah Pengaduan 5 (ima) terakhir yang diterima oleh Pos Pengaduan DLH Provinsi Jambi

NO	TAHUN	JUMLAH PENGADUAN
1.	2014	18
2.	2015	19
3.	2016	20
4.	2017	24
5.	2018	17
JUMLAH		121



Gambar 3.1 Grafik Jumlah Penanganan Pengaduan di Pos Pengaduan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2014 - 2018

Pada tahun 2017, Tim Penanganan Pengaduan DLH Provinsi Jambi menelaah pengaduan yang masuk untuk dilakukan verifikasi dan melakukan penanganan pengaduan lingkungan hidup sebagai berikut:

- a. 11 (sebelas) kegiatan agroindustri, yaitu kasus dugaan pencemaran lingkungan oleh PT. Biccon Agro Makmur, PT. Asiatic Persada, PT. Tebo Alam Lestari, PT. Lambang Sawit Persada, PT. Rudy Agung Agralaksana, PT. PN Unit Usaha Rimbo Duo, PT. Bungo Suko Menanti, PT. Inti Indosawit Subur, PT. Petaling Mandraguna, PT. Mohan Indo Global dan PT Bukit Kausar.
- b. 5 (lima) kegiatan pertambangan, energi dan migas, yaitu dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh PT. Pertamina, PT. Minemex Indonesia, PT. Rimba Palma Sejahtera (PT. PLN), PT Winner Prima Sekata dan PT Transportasi Gas Indonesia.

- c. 3 (tiga) kegiatan manufaktur, prasarana dan jasa, yaitu dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh RSUD Raden Mattaher, PT. Kenali Indah Sejahtera dan PT. Tirta Mas Jaya (Hotel Novita).
- d. 5 (lima) kegiatan lainnya yang merupakan kasus non lingkungan, yaitu permasalahan tiang listrik, tanah urug, banjir perumahan, sengketa tower PT. Protelindo dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Sungai Penuh.

Pada tahun 2018, terjadi penurunan penanganan pengaduan oleh DLH Provinsi Jambi dengan data sebagai berikut:

- a. 6 (enam) kegiatan agroindustri, yaitu kasus dugaan pencemaran lingkungan oleh PTPN VI Pinang Tinggi, PT. Sungai Bahar Pacific Utama, PT Sumber Guna Nabati, PT. Mitra Sawit Jambi, PT. Berkat Sawit Utama dan PT. Surya Utama Agro Lestari.
- b. 9 (sembilan) kegiatan pertambangan, energi dan migas, yaitu dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh PT. Pelabuhan Universal Sumatera, PT. Prakarsa Betung Meruo Senami Jambi, *PT. Minemex*, *PT. Sarolangun Bara Prima*, *PT. Seluma Prima Coal*, *PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa*, Kegiatan Ilegal drilling Desa Lb. Napal, Sarolangun, CV Anugrah Mulia dan Penambangan Pasir di Kerinci.
- c. 0 (nol) untuk kegiatan manufaktur, prasarana dan jasa.
- d. 2 (dua) kegiatan lainnya yang merupakan kasus non lingkungan, yaitu Proyek Peningkatan Jalan di Kabupaten Muaro Jambi dan PT. Rimbo Palma Sejahtera Lestari.



Gambar 3.2 Verifikasi lapangan penanganan pengaduan terhadap PT Transportasi Gas Indonesia.



Gambar 3.3 Verifikasi lapangan penanganan pengaduan terhadap Sungai Pengabuan oleh PT. MSJ.



Gambar 3.4 Verifikasi lapangan penanganan pengaduan terhadap PT. Surya Utama Agro Lestari (SUAL).



Gambar 3.5 Verifikasi lapangan penanganan pengaduan Proyek Peningkatan Jalan di Kabupaten Muaro Jambi.

Pada tahun 2017, Tim Penanganan Pengaduan Lingkungan DLH Provinsi Jambi melaksanakan penanganan pengaduan pada 8 (delapan) kabupaten/kota di Provinsi Jambi dengan rincian seperti tercantum pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup di 8 (delapan) Kabupaten/kota Provinsi Jambi Tahun 2017.

No.	KABUPATEN/KOTA	PERUSAHAAN	JENIS KASUS	JENIS KEGIATAN
1.	Kab. Muaro Jambi	PT. Biccon Agra Makmur	Lingkungan	Agroindustri
		PT. Petaling Mandraguna	Lingkungan	Agroindustri
		PT. Pertamina Field Jambi	Lingkungan	Tambang Energi Migas

		Perumahan Bogenville	Lingkungan	Lainnya
		PT. Kenali Indah Sejahtera	Lingkungan	Manufaktur Sarana Jasa
		PT. Transportasi Gas Indonesia	Lingkungan	Tambang Energi Migas
2.	Kota Jambi	RSUD Raden Mattaher	Lingkungan	Manufaktur Sarana Jasa
		PT. Kenali Indah Sejahtera	Lingkungan	Manufaktur Sarana Jasa
		PT. Protelindo	Lingkungan	Manufaktur Sarana Jasa
		PT. Tirta Mas Jaya (Hotel Novita)	Lingkungan	Manufaktur Sarana Jasa
		PT. Mohan Indo Global	Lingkungan	Agroindustri
		PT. Rimba Palma Sejahtera (PT. PLN)	Lingkungan	Tambang Energi Migas
		Perumahan Bogenville	Lingkungan	Lainnya
		Permasalahan Tanah Urug	Lingkungan	Lainnya
		Permasalahan Tiang Listrik	Lingkungan	Lainnya
3.	Kab. Tebo	PT. Tebo Alam Lestari	Lingkungan	Agroindustri
		PTPN VI Unit Usaha Rimbo Dua	Lingkungan	Agroindustri
		PT. Winner Prima Sekata	Lingkungan	Tambang Energi Migas
4.	Kab. Bungo	PT. Bungo Suko Menanti	Lingkungan	Agroindustri
5.	Kab.Tanjung Jabung Barat	PT. Inti Indosawit Subur	Lingkungan	Agroindustri
		PT. Rudy Agung Agralaksana	Lingkungan	Agroindustri
		PT. Bukit Kausar	Lingkungan	Agroindustri
6.	Kab. Sarolangun	PT. Minemex Indonesia	Lingkungan	Tambang Energi Migas
		PT. Lambang Sawit Perkasa	Lingkungan	Agroindustri
7.	Kab. Batang Hari	PT. Asiatic Persada	Lingkungan	Agroindustri
8.	Kota Sungai Penuh	TPA Sampah	Lingkungan	Manufaktur Sarana Jasa
		PTPN VI Unit Usaha Rimbo Dua	Lingkungan	Agroindustri

Pada tahun 2018, Tim Penanganan Pengaduan Lingkungan DLH Provinsi Jambi melaksanakan penanganan pengaduan pada 7 (tujuh) kabupaten/kota di Provinsi Jambi dengan rincian seperti tercantum pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3 Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup di 7 (tujuh) Kabupaten/kota Provinsi Jambi Tahun 2018.

No.	KABUPATEN/KOTA	PERUSAHAAN	JENIS KASUS	JENIS KEGIATAN
1.	Kab. Muaro Jambi	Proyek Peningkatan Jalan	Lingkungan	Lainnya (Infrastruktur)
		PTPN VI Pinang Tinggi	Lingkungan	Agroindustri
		PT. Sungai Bahar Pacific Utama	Lingkungan	Agroindustri
		PT. Pelabuhan Universal Sumatera	Lingkungan	Tambang Energi Migas
		PT. Surya Utama Agro Lestari	Lingkungan	Manufaktur Sarana Jasa
2.	Kota Jambi	PT. Rimbo Palma Sejahtera Lestari	Lingkungan	Lainnya
3.	Kab.Tanjung Jabung Barat	PT. Mitra Sawit Jambi	Lingkungan	Agroindustri
4.	Kab. Sarolangun	Illegal Drilling	Lingkungan	Tambang Energi Migas
		PT. Minemex Indonesia	Lingkungan	Tambang Energi Migas
		PT. Sarolangun Bara Prima	Lingkungan	Tambang Energi Migas
		PT. Seluma Prima Coal	Lingkungan	Tambang Energi Migas
		PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa	Lingkungan	Tambang Energi Migas
5.	Kab. Batang Hari	PT. Berkat sawit Utama (Asiatic Persada)	Lingkungan	Agroindustri
		PT. Prakarsa Betung Meruo Senami Jambi	Lingkungan	Tambang Energi Migas
6.	Kab. Merangin	PT. Sumber Guna Nabati	Lingkungan	Agroindustri
7.	Kab Kerinci	Tambang pasir di danau Kerinci	Lingkungan	Lainnya

IK – 2 :

Jumlah pembinaan dan Pembentukan Pos Pengaduan Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
b. Jumlah pembinaan dan Pembentukan Pos Pengaduan Kabupaten/Kota	11 kab/kota	11 kab/kota	100	Baik

3.1. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pos Pengaduan Kabupaten/Kota.

Setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi, pada tahun 2017 telah membentuk Pos Pengaduan untuk penanganan pengaduan di kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Pos Pengaduan DLH Provinsi Jambi telah melakukan pembinaan terhadap Pos Pengaduan di 11 (sebelas) kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Rekapitulasi Pos Pengaduan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebagaimana yang terdata dalam Surat Keputusan pada masing-masing Kabupaten/Kota.

Tabel 3.4 Rekapitulasi Pos Pengaduan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

NO.	KAB/KOTA	NO. SK	TANGGAL
1	KOTA JAMBI	374 TAHUN 2011	5 Mei 2011
2	KABUPATEN MUARO	156/Kep.Bup/BLH/2014	2 April 2014
3	KOTA SUNGAI PENUH	660/Kep.297/2015	31 Maret 2015
4	KABUPATEN	338 TAHUN 2015	20 Mei 2015
5	KABUPATEN KERINCI	540/Kep.315/2015	23 Juli 2015
6	KABUPATEN TEBO	316 TAHUN 2016	7 April 2016
7	KABUPATEN TANJAB	356 TAHUN 2016	22 Juni 2016
8	KABUPATEN	16.A TAHUN 2017	23 Januari 2017
9	KABUPATEN BUNGO	168/DLH TAHUN 2017	4 April 2017
10	KABUPATEN TANJAB	448/Kep.Bup/DLH/2017	17 April 2017
11	KABUPATEN MERANGIN	57 TAHUN 2017	26 September 2017

Selain pembinaan terhadap pos pengaduan lingkungan hidup di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi, DLH Provinsi Jambi juga melakukan inventarisasi data penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditangani oleh kabupaten/kota. Pada tahun 2017, tercatat sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) kasus yang ditangani dan dilaporkan oleh DLH Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5 Penanganan Pengaduan oleh Pos Pengaduan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2017.

No.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENGADUAN
1.	Kota Jambi	40
2.	Kabupaten Batanghari	4
3.	Kabupaten Sarolangun	1
4.	Kabupaten Merangin	4
5.	Kabupaten Tebo	4
6.	Kabupaten Bungo	2
7.	Kabupaten Muaro Jambi	15
8.	Kabupaten Taniab Timur	-
9.	Kabupaten Taniab Barat	10
10.	Kota Sungai Penuh	3
11.	Kabupaten Kerinci	6
	JUMLAH	89

Pada tahun 2018, tercatat sebanyak 104 (seratus empat) pengaduan yang telah ditangani dan dilaporkan oleh DLH Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6 Penanganan Pengaduan oleh Pos Pengaduan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2018

No.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENGADUAN
1.	Kota Jambi	39
2.	Kabupaten Batanghari	4
3.	Kabupaten Sarolangun	6
4.	Kabupaten Merangin	3
5.	Kabupaten Tebo	0
6.	Kabupaten Bungo	11
7.	Kabupaten Muaro Jambi	8
8.	Kabupaten Tanjab Timur	0
9.	Kabupaten Tanjab Barat	6
10.	Kota Sungai Penuh	3
11.	Kabupaten Kerinci	24
	JUMLAH	104

IK – 3 :

Jumlah pengawasan Terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Air, Udara, Tanah dan LB3)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
a. Jumlah pengawasan Terhadap Izin Lingkungan,	75 perusahaan	63 perusahaan	84	Cukup Baik

Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Air, Udara, Tanah dan LB3)				
---	--	--	--	--

Terlaksananya Pengawasan terhadap Izin lingkungan dan izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan Pengawasan terhadap Izin lingkungan dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup di targetkan sebanyak 75 Perusahaan dengan realisasi 63 Perusahaan atau 84.00 %. meliputi :

a. Kegiatan Perusahaan dengan jenis usaha/kegiatan yaitu :

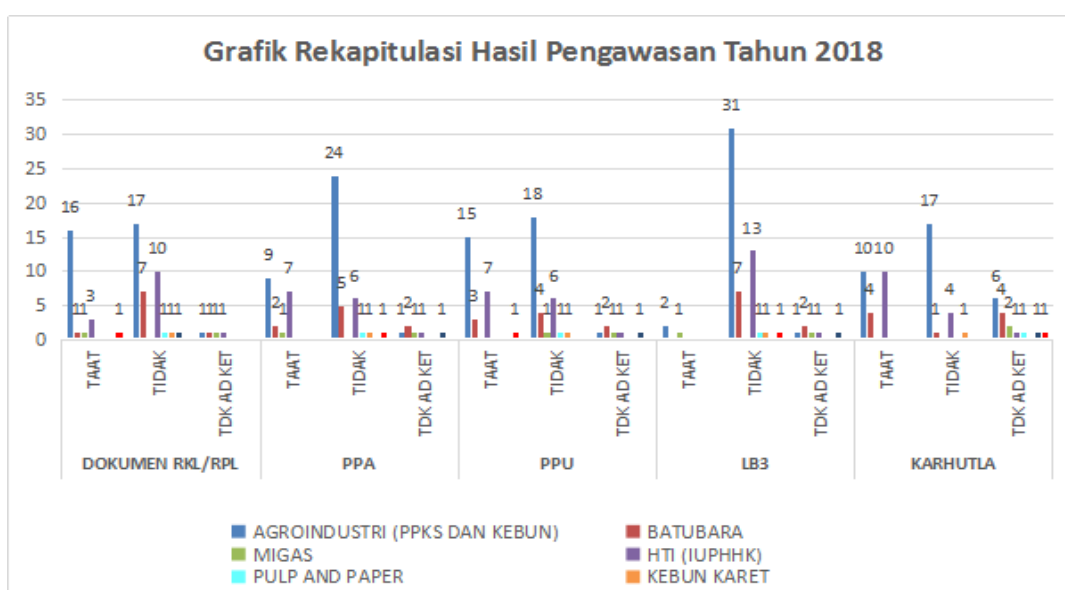
1. Sektor Pabrik Kelapa Sawit (PPKS) dan Kebun sebanyak 33 Perusahaan,
2. Sektor Minyak dan Gas 2 Perusahaan,
3. Sektor HTI 15 Perusahaan,
4. Sektor Pertambangan Batu Bara 9 Perusahaan,
5. Sektor Perkebunan Karet 1 Perusahaan
6. Sektor PLTA 1 Perusahaan.
7. Sektor Pulp And Paper 1 Perusahaan.
8. Sektor Pembangunan pasar angso duo 1 perusahaan.

b. Dari hasil temuan Pengawasan sebanyak 63 Perusahaan yang telah mentaati sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu :

1. Dokumen Lingkungan yang telah mentaati sebanyak 22 atau 34.92 %, dan yang tidak mentaati sebanyak 37 atau 58.73.%, yang tidak beroperasi dan yang hanya pengambilan sampel sebanyak 4 Perusahaan atau 06,34 %.
2. Pengendalian Pencemaran Air yang telah mentaati sebanyak 19 atau 30.15 %, dan yang tidak mentaati sebanyak 38 atau 60,31 %, yang tidak beroperasi dan yang hanya pengambilan sampel dan tahap pengoperasian sebanyak 6 Perusahaan atau 09,52 %.
3. Pengendalian Pencemaran Udara yang telah mentaati sebanyak 26 atau 41,26 %, dan yang tidak mentaati sebanyak 31 atau 49,20 %, yang tidak beroperasi dan yang hanya pengambilan sampel dan tahap pengoperasian sebanyak 6 Perusahaan atau 09,52 %.

4. Pengelolaan Limbah B3 dan B3 yang telah mentaati sebanyak 3 atau 04,76 %, dan yang tidak mentaati sebanyak 54 atau 85,71 %, yang tidak beroperasi dan yang hanya pengambilan sampel dan tahap pengoperasian sebanyak 6 dokumen atau 09,52 %.
5. Pengendalian kerusakan lahan yang telah mentaati sebanyak 24 atau 38,09 %, dan yang tidak mentaati sebanyak 23 atau 36,50 %. Sektor PPKS, pembangunan pasar dan minyak dan Gas tidak ada pengendalian kerusakan lahan sebanyak 16 perusahaan atau 25,39 %.

Gambar 3.1 Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup yang mentaati dan yang tidak mentaati dari hasil temuan pengawasan Tahun 2018.



Sasaran Strategis 9				
- Peningkatan Pembinaan/ bimbingan dalam pengelolaan LH - Pelaksanaan pemilihan duta lingkungan hidup, perlombaan dalam HLH, Pemberian Penghargaan, Pemberian Insentif dan Disinsentif - Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.				
a. Jumlah Peningkatan Kapasitas Tim Pembina dan Penilai Adiwiyata Provinsi Jambi	11 Kab/Kota	0	0	Tidak Baik
b. Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Tim Adiwiyata Kabupaten/Kota	11 Kab/Kota	0	0	Tidak Baik

c. Jumlah Pelaksanaan Penilaian Adiwiyata Kabupaten/Kota	11 Kab/Kota	0	0	Tidak Baik
d. Jumlah Pendampingan Tim Penilai Adiwiyata Nasional dan Adiwiyata Mandiri	11 Kab/Kota	4	36,3	Tidak Baik

IK – 1 :

Jumlah Peningkatan Kapasitas Tim Pembina dan Penilai Adiwiyata Provinsi Jambi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
a. Jumlah Peningkatan Kapasitas Tim Pembina dan Penilai Adiwiyata Provinsi Jambi	11 Kab/Kota	0	0	Tidak Baik

IK – 2 :

Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Tim Adiwiyata Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
b. Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Tim Adiwiyata Kabupaten/Kota	11 Kab/Kota	0	0	Tidak Baik

IK – 3 :

Jumlah Pelaksanaan Penilaian Adiwiyata Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
c. Jumlah Pelaksanaan Penilaian Adiwiyata Kabupaten/Kota	11 Kab/Kota	0	0	Tidak Baik

IK – 4 :

Jumlah Pelaksanaan Penilaian Adiwiyata Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
d. Jumlah Pendampingan	11 Kab/Kota	4	36,3	Tidak

Tim Penilai Adiwiyata Nasional dan Adiwiyata Mandiri				Baik
--	--	--	--	------

Sekolah Adiwiyata sebagai satu komunitas pendidikan memberikan kontribusi yang sangat penting bagi pengelolaan lingkungan hidup. Berbagai upaya pengelolaan lingkungan yang dikembangkan di sekolah, seperti pembuatan biopori, sumur resapan, penghijauan, pembibitan TOGA, green house, pengomposan dan pengurangan serta pemilahan sampah.

Pada tahun ini, Provinsi Jambi memperoleh penghargaan Adiwiyata tingkat Nasional dan Mandiri dari Kementerian LHK kepada sekolah – sekolah yang telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, yaitu :

NO.	KABUPATEN / KOTA	NAMA SEKOLAH	KRITERIA PENGHARGAAN
1.	JAMBI	SDN 1 / IV	ADIWIYATA NASIONAL
		SDN 47 / IV	
2.	BATANG HARI	SDN 34 / I TERATAI	
3.	BUNGO	SMAN 4 MUARO BUNGO	
		SMPN 3 PELEPAT ILIR	
4.	JAMBI	SDN 49 / IV	ADIWIYATA MANDIRI

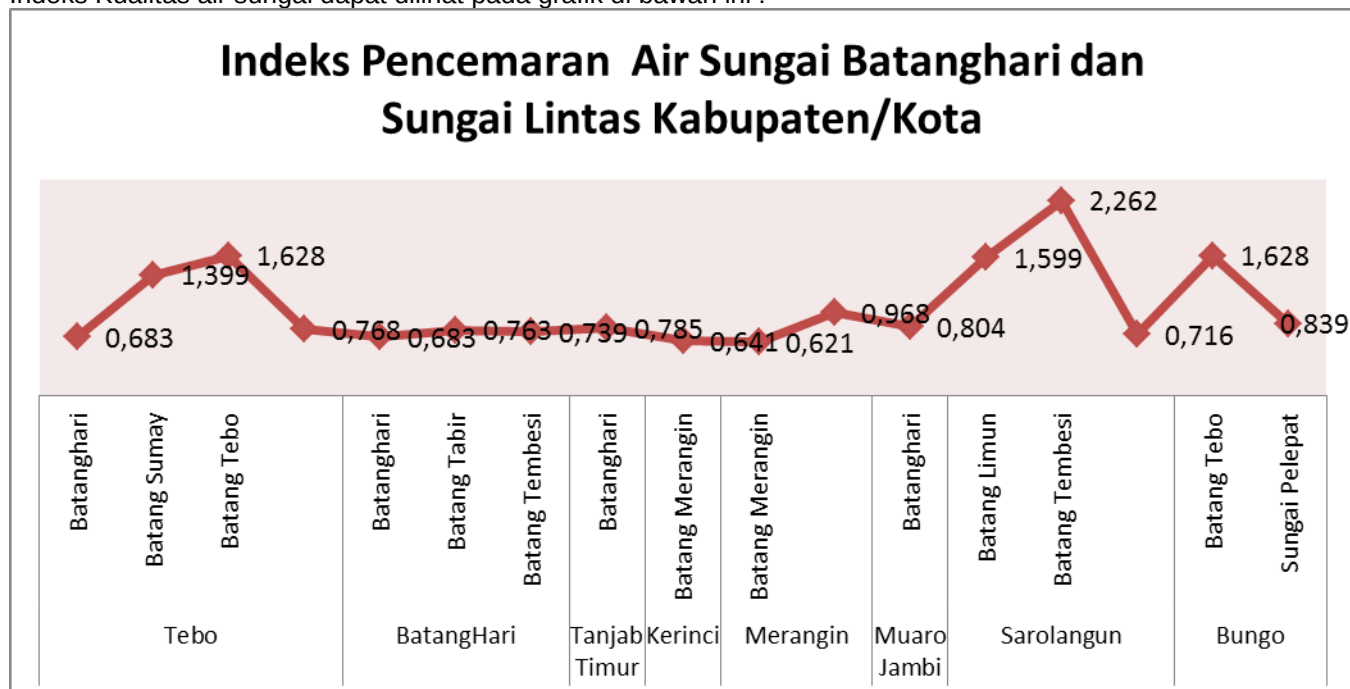
Capaian Kinerja Utama BPSDM

Data Hasil Pemantauan Air Sungai Batang Hari dan Sungai Lintas Kabupaten/Kota Tahun 2018

No	Kabupaten	Nama Sungai	Rekap per sungai	status mutu air
1	Tebo	Batanghari	0,683	memenuhi
		Batang Sumay	1,399	ringan
		Batang Tebo	1,628	ringan
			0,768	memenuhi
2	BatangHari	Batanghari	0,683	memenuhi
		Batang Tabir	0,763	memenuhi
		Batang Tembesi	0,739	memenuhi
3	Tanjab Timur	Batanghari	0,785	memenuhi
4	Kerinci	Batang Merangin	0,641	memenuhi
5	Merangin	Batang Merangin	0,621	memenuhi
			0,968	memenuhi
6	Muaro Jambi	Batanghari	0,804	memenuhi

7	Sarolangun	Batang Limun	1,599	ringan
		Batang Tembesi	2,262	ringan
8	Bungo	Batang Tebo	1,628	ringan
		Sungai Pelepat	0,839	memenuhi

Pemantauan Kualitas Air sungai dilaksanakan pada sungai Batanghari dan sungai lintas Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Sungai lintas kabupaten/kota yang dipantau melalui dana APBD tahun 2018 yaitu Batang Sumay, Batang Tebo, Batang Tabir, Batang Tembesi, Batang Merangin, Batang Limun, Sungai Pelepat. Melalui kegiatan dari dana dekonsentrasi APBN tahun 2018, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi memantau kualitas sungai Batanghari. Pemantauan kualitas sungai Batanghari dilaksanakan pada 16 titik sampling di Kabupaten Tebo, Batang Hari, Tanjung Jabung Timur, dan Muaro Jambi. Status mutu air sungai Batanghari yaitu tercemar ringan. Indeks Kualitas air sungai dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa kualitas air sungai yang tinggi di sungai Batang Tembesi Kabupaten Sarolangun dengan nilai indeks pencemaran 2,262 dan diikuti oleh sungai Batang Tebo dengan nilai indeks 1,628 di Kabupaten Tebo. Hal ini disebabkan oleh parameter TSS yang tinggi akibat dari aktivitas pertambangan emas tanpa izin dan tambang galian C (pasir) di bantaran sungai maupun disungai tersebut.

Status mutu air untuk sungai yang ada di Kabupaten Tebo yaitu Batang Sumay adaah tercemar ringan dengan nilai indeks pencemaran 1,399, dan sungai Batang Tebo status mutu air memenuhi dengan nilai indeks 0,768. Kabupaten Batang Hari untuk Sungai Batang Tabir dengan status mutu air memenuhi dan nilai indeks 0,763, status mutu air sungai Batang Tembesi memenuhi dengan nilai indeks 0,739. Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi yaitu sungai Batanghari dengan status mutu air memenuhi dan nilai indeks 0,785 dan 0,804. Kabupaten Kerinci pada sungai Batang Merangin dengan status mutu air memenuhi dengan nilai indeks 0,641. Kabupaten Merangin untuk sungai Batang Merangin status mutu air memenuhi dan nilai indeks 0,621 dan 0,968. Kabupaten Sarolangun untuk sungai Batang Tembesi dengan status mutu air tercemar ringan dan memenuhi, nilai indeks 2,262 dan 0,716. Kabupaten Bungo untuk sungai Pelepat status mutu air memenuhi dan nilai indeks 0,839.

Status mutu air sungai Batanghari pada 16 titik pantau memenuhi dan nilai indeks 0,825. 16 titik pantau melalui 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Tebo, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi.

Sungai di Provinsi Jambi baik sungai besar dan anak sungai berjumlah $\pm$ 69 sungai. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sesuai dengan kewenangannya memantau kualitas air sungai lintas kabupaten/kota dan sungai Batanghari, sungai Batang Merangin, Batang Limun, Batang Tembesi, Batang Tebo, Sungai Pelepat, Sungai Batang Tabir, Sungai Batang Sumay sebanyak 28 titik, 3 kali pemantauan. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi melakukan pemantauan kualitas air danau pada 2 danau yaitu Danau Baru di Kabupaten Sarolangun dan Danau Kerinci di Kabupaten Kerinci dengan indeks kualitas air 55. Status Mutu air sungai tercemar ringan dengan nilai indeks pencemaran 1,9 tercemar ringan dan indeks kualitas air sungai 65. Parameter yang mencemari sungai yaitu fecal coli dan TSS tinggi. Parameter fecal coli dipengaruhi dari penggunaan sungai untuk MCK, sedangkan TSS diakibatkan dari degradasi sungai akibat berkurangnya tutupan lahan dan aktivitas pertambangan.

Indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Jambi yaitu 66,828 dengan kriteria kurang, perlu peningkatan khususnya indeks kualitas tutupan lahan yang akan berkorelasi dengan perbaikan indeks kualitas air dan indeks kualitas udara.

Indeks Kualitas Air dari tahun 2015-2018

2015 : 52,52
 2016 : 54
 2017 : 57,11
 2018 : 60

Indeks Pencemaran Udara tahun 2015-2018

2015 : 83,14
 2016 : 82,22
 2017 : 89,11
 2018 : 92,66

Indeks Kualitas Lingkungan tahun 2015-2018

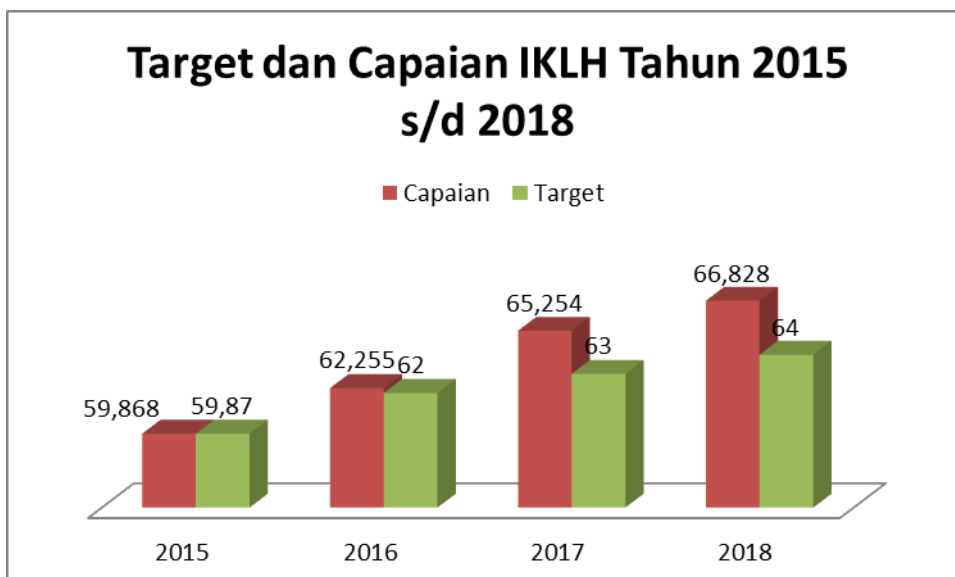
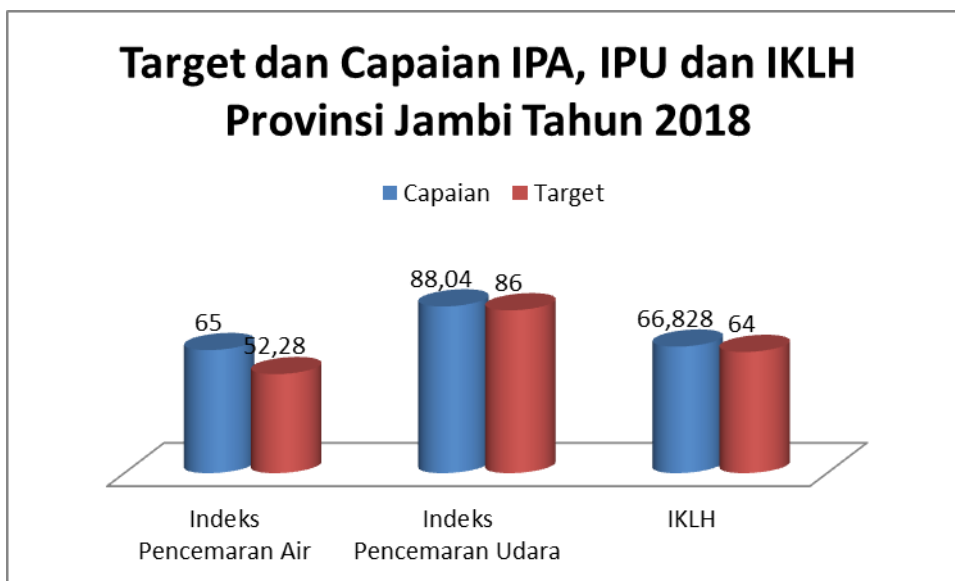
2015 : 59,87
 2016 : 62,25
 2017 : 65,25
 2018 : 66,82

Target Indeks Pencemaran Air, Udara dan IKLH tahun 2016-2021

Uraian	Target					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks kualitas lingkungan hidup	62,25	63	64	64,5	65	66
Indeks kualitas air	52,24	52,26	52,28	52,30	52,32	52,34
Indeks	84	85	86	87	88	89

kualitas udara						
----------------	--	--	--	--	--	--

Grafik Target dan Capaian Indeks Pencemaran Air, Indeks Pencemaran Udara dan IKLH Tahun 2018



Capaian realisasi IKLH tahun 2018 66,828 dari target yang telah ditetapkan 64 atau meningkat 104,42%. Hal ini

Isu Strategis Lingkungan :

1. Pencemaran Sungai Batanghari akibat aktivitas PETI
2. Kebakaran lahan dan hutan
3. Pencemaran Mercury di Danau Kerinci
4. Konflik Lahan

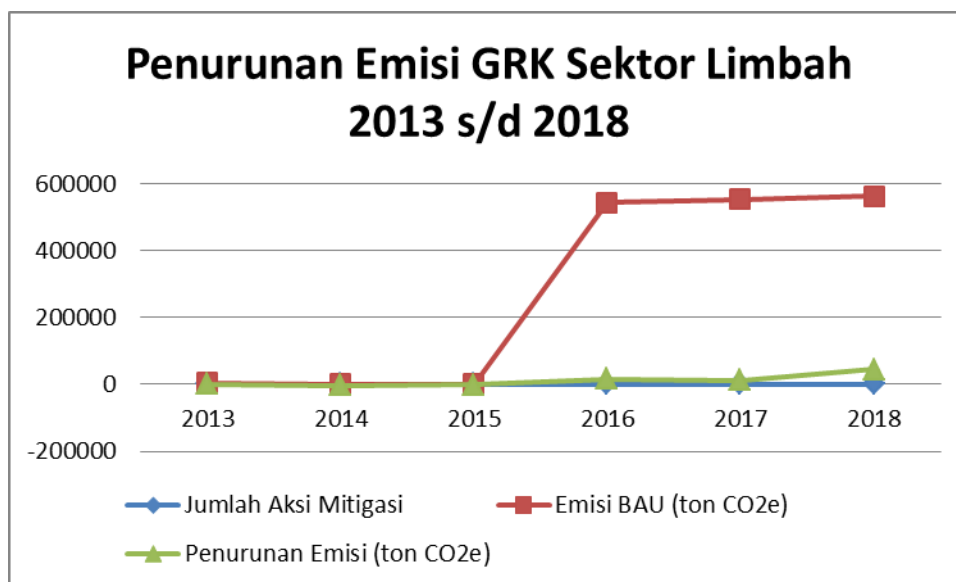
Penurunan Emisi Gas Ruma Kaca Sektor Limbah s/d Tahun 2018

Jumlah penduduk sangat mempengaruhi jumlah emisi gas rumah kaca disuatu wilayah. Provinsi Jambi termasuk provinsi yang sedang tumbuh dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Peningkatan jumlah penduduk meningkatkan jumlah limbah yang pada akhirnya menambah jumlah emisi gas CO₂ dan Methan (CH₄). Pengukuran dilakukan dengan metode Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) terhadap penurunan emisi GRK di Provinsi Jambi melalui identifikasi kegiatan-kegiatan yang menurunkan emisi disetiap SKPD terkait di seluruh kabupaten /kota.

Berdasarkan hasil perhitungan maka dapat dibedakan 2 kegiatan yang dapat menurunkan emisi secara langsung maupun tidak langsung. Penurunan emisi secara langsung dilakukan melalui kegiatan inti, berupa pembangunan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) untuk limbah kota/kabupaten. Tipe pengelolaan langsung ini dengan meningkatkan TPA open dumping menjadi TPA sanitari landfill. Untuk mengetahui tingkat penurunan emisi pertahun dari tahun 2013 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Pengelolaan Limbah	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Aksi Mitigasi	9	16	7	39	39	16
Emisi BAU (ton CO ₂ e)	3.901,66	919,30	21,50	543.000	553.000	562.000
Penurunan Emisi (ton CO ₂ e)	1.505,30	(2.758,10)	(322,16)	16.923	12.732,29	44.270

Dari tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2018 adanya peningkatan emisi BAU (ton CO₂e) menjadi 553.000 dan penurunan emisi (ton CO₂e) menurun sebesar 12.732,29. Peningkatan emisi BAU dan penurnan emisi dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

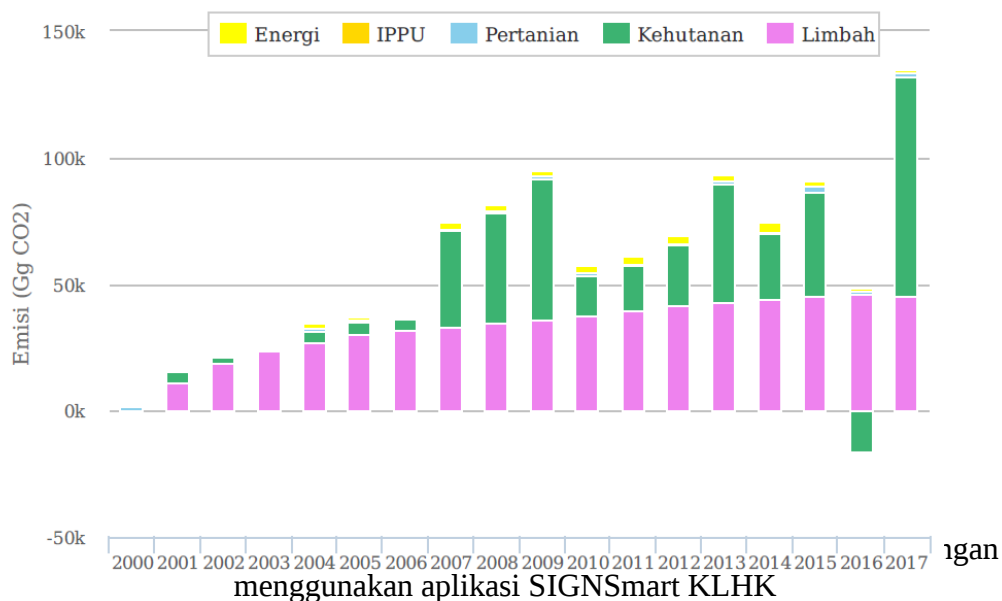


Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa penurunan emisi meningkat dari tahun 2017 menjadi 44.270 ton CO₂e.

Tabel 3.27.
Total Emisi GRK Provinsi Jambi dengan metode perhitungan menggunakan aplikasi SIGNSmart KLHK

Tahun	Sektor	Total Emisi (Gg CO ₂ -e)
2017	Limbah	45.195,01
	Pertanian	987,15
	Energi	1.341,25
	Kehutanan	87.182, 31
Jumlah		134.705,72

Emisi Sektor ENERGI, IPPU, PERTANIAN, KEHUTANAN, & LIMBAH

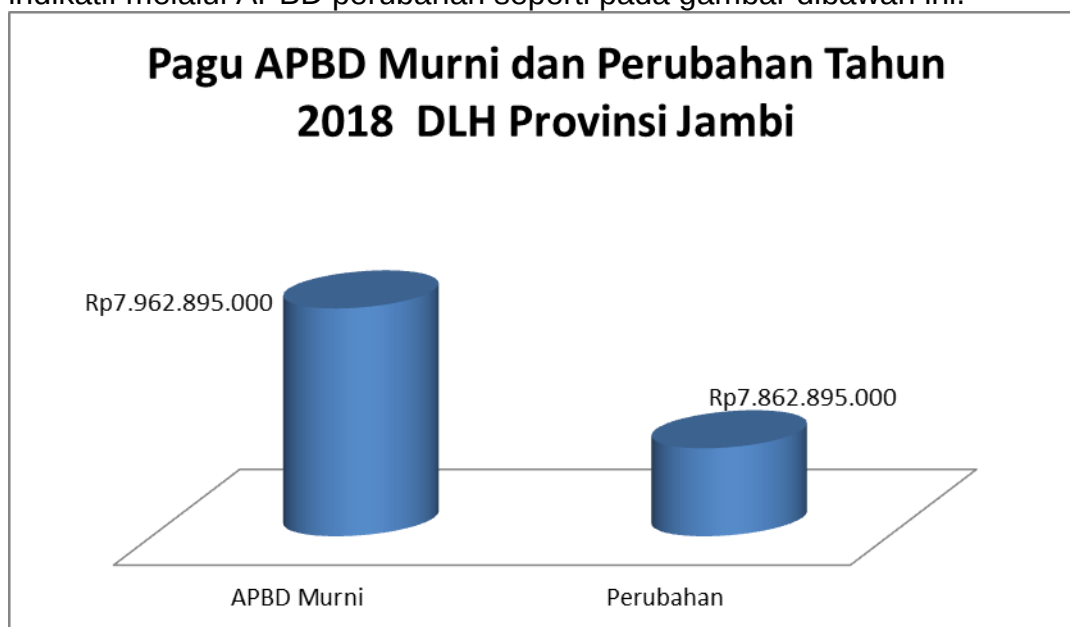


Kabupaten/ Kota yang telah memasukan data pada aplikasi SIGN Smart adalah sebagai berikut :

1. Kota Jambi
2. Batang Hari
3. Kerinci
4. Kerinci
5. Tebo
6. Tanjab Barat
7. Sungai Penuh

1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran program dan kegiatan tahun 2018 (tidak termasuk belanja tidak langsung) semula Rp. 7.862.895.000,- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sampai dengan APBD Perubahan menjadi Rp.7.962.895.000,- (tujuh milyar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) mendapat penambahan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau sebesar 1,3% dari pagu APBD murni. Peningkatan pagu indikatif melalui APBD perubahan seperti pada gambar dibawah ini.



Dari pagu setelah perubahan realisasi keuangan pada tahun 2018 sebesar Rp. 7.962.895.000,- atau sebesar 93,34% dan realisasi fisik sebesar 93,34 %.

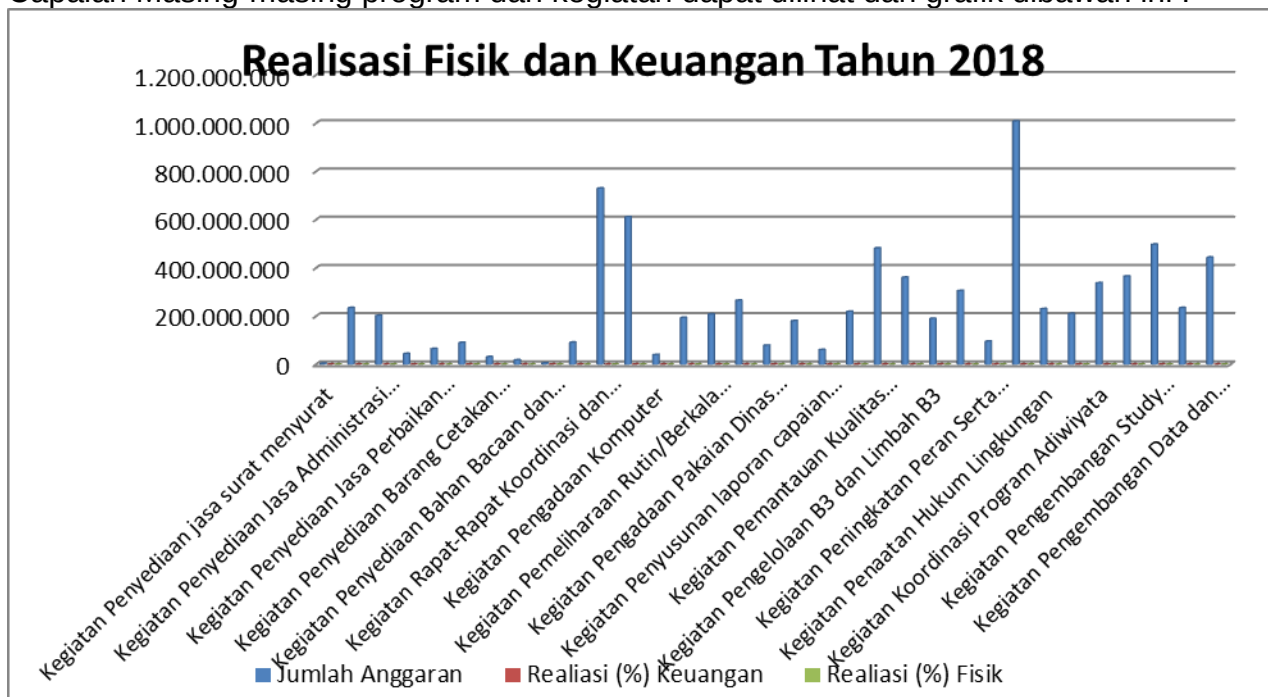
Realisasi masing-masing kegiatan sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realiasi (%)	
			Keuangan	Fisik
I	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	1.511,987.700	96,54	96,54
1	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	3.300.000	100	100
2	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	234.000.000	100	100
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	202.166.000	95,96	95,96
4	kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	43.864.800	94,58	94,58
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	64.500.000	100	100
6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	89.792.800	100	100
7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.120.000	100	100

8	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.000.000	100	100
9	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	100	100
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	90.700.000	72,82	72,82
11	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	729.544.100	99,01	99,01
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.316.457.700	98,80	98,80
1	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	610.850.000	97,98	97,98
2	Kegiatan Pengadaan Komputer	39.310.000	96,67	96,67
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	193.497.700	100	100
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	207.800.000	99,63	99,63
5	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	265.000.000	99,51	99,51
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	78.000.000	100	100
1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	78.000.000	100	100
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	180.000.000	95,25	95,25
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	180.000.000	95,25	95,25
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	330.899.600	99,52	99,52
1	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	60.264.100	99,98	99,98
2	Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Program Lingkungan Hidup	218.735.000	99,41	99,41
VI	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	3.216.376.500	92,02	92,02
1	Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan	481.473.250	98,94	98,94
2	kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang lingkungan Hidup	360.000.000	98,41	98,41
3	Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	189.526.750	98,78	98,78
	Kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL	305.000.000	71,10	71,10
	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	95.000.000	98,51	98,51
6	Kegiatan Pendayagunaan Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah	1.007.984.000	95,59	95,59
7	Kegiatan Penaatan Hukum Lingkungan	230.000.000	94,05	94,05
8	Kegiatan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	210.000.000	96,18	96,18
9	Kegiatan Koordinasi Program Adiwiyata	337.392.500	14,41	14,41
VII	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1.096.152.000	78,89	78,89
1	Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	365.000.000	70,30	70,30

	Kegiatan Pengembangan Study Kebijakan Lingkungan	497.152.000	78,74	78,74
2	Kegiatan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan	234.000.000	85,97	85,97
VIII	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	443.610.000	98,17	98,17
1	Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	443.610.000	98,17	98,17

Capaian Masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari grafik dibawah ini :



Untuk capaian indikator kinerja dari dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

BAB IV P E N U T U P

Dari hasil evaluasi kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2018 dengan menggunakan metoda sebagaimana ditetapkan sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dapat disimpulkan :

1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi selama Tahun 2018 memiliki 33 kegiatan yang terukur dan terangkum dalam 8 program yang terdiri atas 5 program rutin 3 program prioritas yang terdapat pada Renstra DLH Provinsi Jambi tahun 2016 - 2021 guna mencapai sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
2. Berdasarkan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jamb, berdasarkan tingkat penyerapan anggaran dari 33 kegiatan yang dilakukan pada tahun 2018, terdapat 9 (sembilan) kegiatan baik, 20 kegiatan dengan hasil Baik rata – rata capaian 80-99,9 % , 4 (empat) kegiatan dengan hasil cukup baik rata –rata capaian < 80 %, berdasarkan pagu anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tahun 2018 sebesar Rp 7.962.895.000,-, terealisasi sebesar 7.962.895.000,- atau sebesar 93,34% . Sedangkan persentase capaian kinerja kegiatan adalah sebesar 88,46 %.
3. Pada tahun 2018 DLH Provinsi Jambi memberikan pemasukan kepada daerah melalui UPTD Laboratorium Lingkungan DLH sebesar Rp. 4.141.975.012 melebihi target 118,82 yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 3.400.000.000,-
4. Beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018 sehingga pencapaian hasil belum sepenuhnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan meliputi :
 - Masih kurangnya tenaga fungsional bidang lingkungan hidup yaitu PPLHD , PEDAL dan PPNS.
 - Belum optimalnya koordinasi antar OPD terkait baik di Provinsi Jambi maupun di Kabupaten/Kota dalam pemantauan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.
5. Mencermati hasil akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan yang cukup baik dan kurang baik pada Tahun 2018, maka Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi akan terus berupaya mengembangkan acuan untuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj)

sehingga diharapkan laporan akuntabilitas pada tahun yang akan datang dapat disusun lebih akuntabel serta terus berusaha meningkatkan kinerja untuk memperoleh hasil yang optimal untuk mewujudkan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

SARAN

1. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target kinerja yang sudah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan DLH Provinsi Jambi akan ditingkatkan.
2. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota akan dilakukan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan instansi di Provinsi maupun di Kabupaten/ Kota dan dunia usaha.
3. Agar implementasi sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segera direalisasikan sinergisitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan *out put* maupun *out come* kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergisitas tersebut, kinerja organisasi yang dibiayai melalui dana APBD benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
4. Menjadikan SAKIP ukuran kinerja organisasi secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi *reward* and *punishment* yang tegas dan ketat